



**Laporan Akhir**  
**PENYUSUNAN KAJIAN**  
**INDEKS WILLIAMSON DAN INDEKS GINI**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)  
SURAKARTA, 2021**



# **PENYUSUNAN INDEKS WILLIAMSON DAN INDEKS GINI**

**Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah  
Tahun 2021**

## **PRAKATA**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatannya sehingga Penyusunan Indeks Williamson dan Indeks Gini ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Indeks Williamson dan Indeks Gini merupakan produk tahunan yang disusun oleh Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk melihat ketimpangan kemiskinan Kota Surakarta dalam jangka waktu satu tahun.

Bidang Ekonomi Bappeda dan Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama segenap pimpinan dan pegawai di Bappeda Kota Surakarta yang telah membantu mengalokasikan anggaran, support data, dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dan menyempurnakan kajian ini.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2021

Bidang Ekonomi Bappeda Surakarta

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Kegiatan .....	3
1.3. Manfaat Kegiatan .....	3
1.4. Lingkup Kegiatan .....	3
1.5. Sistematika Laporan .....	4
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA</b> <b>SURAKARTA</b> .....	<b>5</b>
2.1. Visi Dan Misi Kota Surakarta .....	5
2.2. Tema Pembangunan Kota Surakarta .....	6
2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi .....	7
2.4. Kependudukan .....	10
2.5. Inflasi .....	11
2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	13
<b>BAB III</b> <b>KONSEP DAN METODE KAJIAN</b> .....	<b>17</b>
3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	17
3.2. Kesejahteraan .....	20
3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	22
3.4. Kemiskinan .....	23
3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	25
3.6. Konsentrasi Kemiskinan .....	26
3.7. Metodologi .....	27
3.7.1. Pendekatan Kajian .....	27
3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data .....	28
3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan .....	29
3.7.4. Kerangka Pikir Kajian .....	29
<b>BAB IV</b> <b>HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
4.1. Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi .....	30
4.1.1. Analisis Proporsi dan Pertumbuhan .....	30
4.1.2. Analisis PDRB Perkapita .....	33
4.1.3. Analisis Kredit Sektoral PDRB .....	36
4.2. Analisis Ketenagakerjaan .....	38
4.3. Analisis Proxy PDRB Kecamatan .....	44
4.4. Analisis Kemiskinan .....	46
4.5. Analisis Ketimpangan .....	51

	4.5.1. Indeks Gini .....	51
	4.5.2. Indeks Williamson .....	54
	4.5.3. Indeks Theil .....	55
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	57
	5.1. Kesimpulan .....	57
	5.2. Rekomendasi .....	57
	DAFTAR PUSTAKA .....	60

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta .....	6
Tabel 2.2	Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020 .....	9
Tabel 2.3	PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020 Berdasarkan Jenis Pengeluaran .....	10
Tabel 2.4	Perbandingan Jumlah dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2020 .....	10
Tabel 2.5	Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020 .....	11
Tabel 2.6	Inflasi Tahun 2020 .....	12
Tabel 2.7	Perbandingan Inflasi Sektoral Tahun 2011-2020 .....	13
Tabel 2.8	Nilai Maksimum dan minimum Komponen IPM Metode Baru	14
Tabel 2.9	Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020 .....	16
Tabel 2.10	Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020 .....	16
Tabel 4.1	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2020 .....	31
Tabel 4.2	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2020.....	32
Tabel 4.3	Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2010-2020 .....	34
Tabel 4.4	Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Tahun 2019-2020 .....	35
Tabel 4.5	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2010-2019 .....	36
Tabel 4.6	Alokasi Kredit Perbankan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2018- 2020 .....	37
Tabel 4.7	Proporsi Non Performing Loan (NPL) Tahun 2020 .....	38
Tabel 4.8	Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010-2020 ..	40
Tabel 4.9	Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020 .....	40
Tabel 4.10	Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020 .....	41
Tabel 4.11	Perbandingan Penduduk yang Bekerja dengan PDRB Tahun 2018 .....	42

Tabel 4.12	Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun 2019-2020 .....	44
Tabel 4.13	Proporsi PDRB Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2009-2011 dan 2019 .....	45
Tabel 4.14	Proxy PDRB Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2010-2020 .....	45
Tabel 4.15	Proxy PDRB Perkapita Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2010-2020 .....	45
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010-2020 .....	45
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2010-2020 ...	46
Tabel 4.18	Indikator Kemiskinan Surakarta Tahun 2010-2020 .....	47
Tabel 4.19	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020 (ribuan orang) .....	48
Tabel 4.20	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020 .....	49
Tabel 4.21	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019-2020 .....	49
Tabel 4.22	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2020 .....	50
Tabel 4.23	Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020 .....	50
Tabel 4.24	Prediksi Indeks Kota Surakarta Tahun 2010-2020 .....	52
Tabel 4.25	Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2010-2020 .....	53
Tabel 4.26	Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2020 .....	54
Tabel 4.27	Proyeksi Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2020	55
Tabel 4.28	Indikator Kemiskinan Antar Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2018-2020 .....	56
Tabel 4.29	Indeks Theil Kota Surakarta Tahun 2018-2020 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2020 .....	7
Gambar 2.2	Perkembangan laju Inflasi Tahun 2010-2020 .....	12
Gambar 2.3	Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2020 .....	15
Gambar 4.1	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2011-2020 .....	33
Gambar 4.2	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2010-2020 .....	34
Gambar 4.3	Tingkat Pengangguran Tahun 2010-2020 .....	39
Gambar 4.4	Indeks Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015 .....	51
Gambar 4.5	Hasil Perbandingan Indeks Gini vs Indeks Ketimpangan Baru Kota Surakarta Tahun 2000-2015 .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi daerah dengan aspek kependudukan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung beberapa makna yang penting. Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali permasalahan penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Aspek kependudukan dalam pembangunan daerah membawa beberapa permasalahan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin setiap penduduk mendapatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah membuat tugas tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya angka penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendorong dan memberikan stimulus yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, bahkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan, apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: (1) peningkatan standar hidup setiap orang, (2) penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri, dan (3) peningkatan kebebasan setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah menyusun kebijakan yang diharapkan mampu menghilangkan atau

mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan, sehingga langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah diharapkan mampu: (1) mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, (2) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, (3) menciptakan atau menambah lapangan kerja, (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (5) menjaga kelestarian sumber daya alam.

Di sisi lain dalam pembangunan daerah sering kali terjadi munculnya “rantai yang hilang” dalam arti bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah justru tidak mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan dan menyebabkan peningkatan disparitas atau kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Dalam teori *trickle down effect*, hasil pembangunan daerah tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak menetes ke bawah. Bila kondisi ini terjadi, pembangunan daerah berhasil dari aspek ukuran makroekonomi daerah, namun belum mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan adanya *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Dari sisi pertumbuhan, pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila terbukti terjadi kenaikan output yang terukur dari nilai PDRB yang bersumber dari sektoral ekonomi. Di sisi yang lain, dari aspek pemerataan belum dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan yang terjadi tidak diikuti oleh aspek pemerataan. Bila kondisi ini terjadi, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti yang telah disebutkan menjadi tidak berhasil, atau dapat pula terjadi situasi dimana pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, namun tidak diikuti dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan disparitas.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai negara ternyata tidak mereduksi kemiskinan, dan kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar. Beberapa penelitian lain menghasilkan kondisi yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara langsung, atau penurunan tingkat kemiskinan terjadi melalui penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan secara cepat bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prasyarat dalam pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Atas dasar hal tersebut sangat penting bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengkaji apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mampu secara nyata menekan angka kemiskinan dan kesenjangan



distribusi pendapatan, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai mengingat tujuan pembangunan bukan semata-mata kenaikan pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memiliki dimensi lain yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan
- b. Mengukur dan menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta
- c. Mengukur dan menganalisis ketimpangan atau konsentrasi kemiskinan di Kota Surakarta

## **1.3. MANFAAT**

Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui dan dianalisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan kemiskinan antar kecamatan di wilayah Kota Surakarta.

Dengan demikian, akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan analitis perbandingan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antar kecamatan di Kota Surakarta sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan dan strategi guna mengatasi permasalahan tersebut.

## **1.4. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.
- b. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta.
- c. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan Kota Surakarta.

- d. Merumuskan usulan kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

## **1.5. SISTEMATIKA LAPORAN**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, serta lingkup kegiatan dari kajian tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antar kecamatan di Kota Surakarta. Latar belakang dalam bab ini menguraikan dasar serta arti penting dari kajian ini.

### **BAB II : Kondisi Makroekonomi Kota Surakarta**

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi makroekonomi Kota Surakarta secara umum serta relevansi kondisi tersebut dengan aspek kependudukan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan fokus mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam konteks makroekonomi Kota Surakarta.

### **BAB III : Konsep dan Metode Kajian**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar teori yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis umum kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang memiliki relevansi dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, serta hasil pengukuran dan analisis ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kota Surakarta.

### **BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan ketimpangan distribusi pendapatan serta kemiskinan di Kota Surakarta.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA**

#### **2.1. VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA**

Visi Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.”**

Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Surakarta memiliki 8 program prioritas sebagai berikut:

1. Bangkit dari pandemi Covid-19
2. Pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan
3. Pendidikan dan kesejahteraan
4. Pariwisata dan industri kreatif
5. Tata ruang dan infrastruktur
6. Investasi kebudayaan
7. Kepemudaan dan kesetaraan gender

## 8. Kerjasama Solo Raya

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh posisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator. Antara lain indikator makroekonomi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja makroekonomi. Target indikator kinerja makroekonomi Kota Surakarta hingga 2020 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target Indikator Makroekonomi RPJMD Kota Surakarta**

No	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB	5 + 1	5 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1
2	Tingkat inflasi	3 + 1	4 + 1	3 + 1	3 + 1	4 + 1
3	Indeks Gini	0.332	0.321	0.320	0,305	0,301
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9.64	8.99	8.34	7,68	7,03
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	77.08	77.11	77.16	77,19	77,23
6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.44	10.51	10.59	10,67	10,75
7	Harapan lama sekolah (tahun)	14.34	14.53	14.73	14,94	15,15
8	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14,291,000.00	14,806,000.00	15,301,000.00	15.776.000,00	16.242.000,00
9	Pendapatan per kapita (Rupiah)	58,142,285	60,922,566	63,823,146	66.534.166	69.337.235,56
10	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	97.08	97.37	97.67	97,98	98,29
11	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5.83	5.76	5.68	5,61	5,55

Sumber: RPJMD Kota Surakarta, 2021.

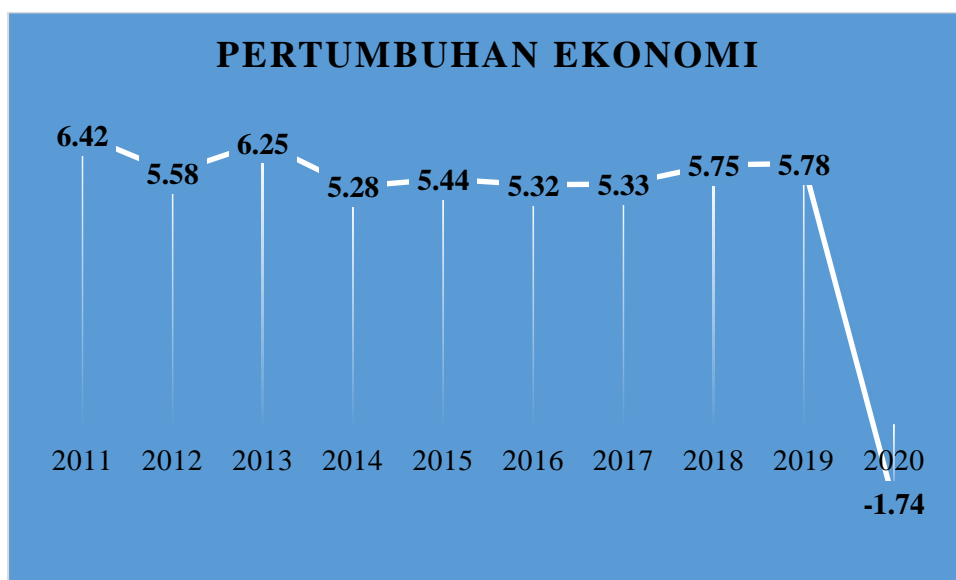
## 2.2. TEMA PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

Berdasarkan visi dan misi yang ada, tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2021 adalah **“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”**. Tema ini fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak

pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kota, dan peningkatan jumlah pengunjung luar kota yang beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lain yang diharapkan adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, dan event kota yang melibatkan pelaku dari luar daerah dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan.

### 2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Surakarta tercatat 5,78%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya adalah 5,75%. Selama 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat mengalami penekanan, yang didasarkan pada semakin kecilnya kenaikan pertumbuhan ekonomi selama 2017-2019 tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta akhirnya mencapai angka -1,74% akibat situasi dan kondisi Pandemi Covid, yang melumpuhkan hampir semua aktivitas perekonomian. Sepanjang 2010-2019, pertumbuhan ekonomi terendah Surakarta adalah pada tahun 2014 yang mencapai sebesar 5,28% sedangkan yang tertinggi adalah tahun 2011 yang mencapai 6,42%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Surakarta per tahun selama 2010-2020 adalah 4,94%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mencapai -1,74% tersebut menyebabkan adanya tekanan yang sangat berat, mengingat tidak mudah untuk memulihkan perekonomian dalam waktu yang singkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011-2020

Berdasarkan pendekatan harga berlaku (*current price*), perekonomian Surakarta pada tahun 2020 didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (27,11%), sektor perdagangan besar dan eceran (22,16%), sektor informasi dan komunikasi (12,01%), serta sektor industri pengolahan (8,46%). Proporsi sektor tersebut selama 2010-2019 meski berfluktuasi namun cenderung konstan. Dibandingkan dengan periode awal RPJMD yaitu tahun 2016, kontribusi beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan adalah sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial. Beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan minum terlihat menurun kontribusi meskipun sangat kecil.

Bila dilihat mulai 2010 sektor industri pengolahan menunjukkan kenaikan kontribusi yang cukup besar dari 7,62% di tahun 2010 menjadi 8,45% di tahun 2019, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (dari 4,87% menjadi 5,41%), sektor informasi dan komunikasi (dari 11,36% menjadi 12,01%), sektor jasa keuangan dan asuransi (3,65% menjadi 3,76%), sektor jasa perusahaan (dari 0,64% menjadi 0,86%), sektor jasa pendidikan (dari 3,66% menjadi 5,51%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 0,85% menjadi 1,12%). Di tahun 2020 beberapa sektor menunjukkan penurunan proporsi dibandingkan tahun 2019, seperti sektor industri pengolahan menjadi 8,45%, sektor konstruksi (27,04%), sektor transportasi dan pergudangan (1,03%), sektor perdagangan (21,63%), dan sebagainya.

Dengan demikian selama 2010-2020 terlihat adanya pergeseran perubahan struktur ekonomi Surakarta secara gradual menjadi kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan transportasi dan pendidikan. Perubahan struktur ini sangat wajar mengingat perubahan struktur ekonomi yang dinamis umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat lama.

**Tabel 2.2**  
**Struktur PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,52	0,51	0,54	0,52	0,52	0,52	0,50	0,49	0,49	0,51	0,51
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	7,62	8,08	8,27	8,39	8,70	8,59	8,62	8,52	8,45	8,46	8,45	8,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,22	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16	0,17
F. Konstruksi	28,23	27,04	26,99	26,50	26,80	26,91	26,98	26,78	27,14	27,11	27,04	27,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,42	23,34	23,52	22,79	22,56	22,48	22,35	22,15	22,16	21,63	22,81
H. Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,49	2,42	2,45	2,59	2,68	2,63	2,59	2,55	2,59	1,03	2,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,98	5,36	5,55	5,70	5,76	5,83	5,66	5,49	5,41	4,58	5,35
J. Informasi dan Komunikasi	11,36	11,13	11,23	11,01	10,77	10,63	10,45	11,27	11,67	12,01	14,54	11,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,66	3,71	3,67	3,66	3,75	3,86	3,88	3,84	3,76	3,90	3,75
L. Real Estate	4,23	4,17	4,09	3,95	4,04	4,11	4,12	4,08	3,96	3,85	3,97	4,05
M,N. Jasa Perusahaan	0,64	0,67	0,69	0,72	0,73	0,78	0,82	0,81	0,84	0,86	0,81	0,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	6,08	6,17	6,10	5,89	5,97	5,96	5,73	5,54	5,40	5,39	5,86
P. Jasa Pendidikan	3,66	4,42	4,87	5,28	5,41	5,37	5,34	5,43	5,46	5,51	5,64	5,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,92	1,01	1,02	1,08	1,10	1,10	1,11	1,12	1,12	1,31	1,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,04	0,99	0,95	0,94	0,95	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84	0,95
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

PDRB Kota Surakarta dari pendekatan pengeluaran menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rumah tangga selama 2010-2019 relatif stabil, sementara pengeluaran LNPRT menunjukkan tren proporsi yang meningkat. Pengeluaran pemerintah sepanjang 2010-2019 meski sedikit mengalami fluktuasi namun proporsinya cenderung turun sedangkan pembentukan modal tetap bruto terlihat menunjukkan proporsi yang meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa komponen investasi dalam pembentukan PDRB di Kota Surakarta memiliki peran yang sangat penting dan strategis, serta menunjukkan tren peningkatan. Untuk proporsi ekspor bersih, terlihat selama 2010-2019 menunjukkan defisit yang cukup besar, yang berarti masih tingginya impor barang dan jasa yang masuk ke Kota Surakarta dibandingkan ekspor barang dan jasa dari Kota Surakarta.

**Tabel 2.3**

**PDRB Kota Surakarta Tahun 2010-2020 Berdasarkan Jenis Pengeluaran**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,66	50,77	50,89	51,79	51,99	51,93	50,83	50,75	50,84	50,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,55	0,56	0,59	0,62	0,60	0,61	0,61	0,63	0,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,70	11,85	12,15	12,13	12,51	11,61	11,46	10,97	10,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	67,36	66,46	66,40	66,38	67,55	66,90	67,64	67,73	70,15	70,56
Perubahan Inventori	0,06	4,06	6,78	4,21	2,54	0,63	0,23	0,35	0,71	0,61
Net Ekspor Barang dan Jasa	-30,20	-33,54	-36,48	-35,14	-34,83	-32,58	-30,93	-30,89	-33,29	-32,86
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

**2.4. KEPENDUDUKAN**

Ketimpangan memiliki relevansi erat dengan masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Ketimpangan dipengaruhi bukan saja dari aspek pendapatan, namun juga struktur penduduk baik dari sisi jumlah, usia, latar belakang pekerjaan, dan sebagainya. Semakin besar jumlah penduduk berpotensi mendorong semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Jumlah penduduk Surakarta tahun 2019 berdasarkan data Disdukcapil Kota Surakarta adalah 575.230 jiwa sedangkan berdasarkan data BPS 519.587. Tahun 2020, berdasarkan data sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 522.364. Sepanjang 2013-2020 rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Surakarta adalah sebesar 0,40% (berdasarkan data BPS) atau 0,34% (berdasarkan data Disdukcapil 2013-2019). Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, rata-rata pertumbuhan penduduk Surakarta lebih rendah sepanjang 2013-2020.

**Tabel 2.4**

**Perbandingan Jumlah dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2020**

No	Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	Surakarta (BPS)	507.798	510.105	512.226	514.171	516.102	517.887	519.587	522.364*	0,40
	Surakarta (Disdukcapil)	563.659	552.650	557.606	570.876	562.801	569.711	575.230	n.a.	0,34
2	Provinsi Jawa Tengah	33.264.339	33.522.663	33.774.141	34.019.095	34.257.865	34.490.835	34.720.000	36.516.035	1,34
3	Indonesia	248.818.100	252.164.800	255.461.700	258.705.000	261.890.900	265.015.300	266.910.000	270.200.000*	1,18

\*hasil Sensus Penduduk 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.



Dilihat dari sebarannya, berdasarkan data BPS tahun 2020, proporsi penduduk di Kecamatan Serengan adalah 9,15% dan Kecamatan Banjarsari adalah 32,31%. Tingkat kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Serengan yaitu 17.138,24/km<sup>2</sup>. Dengan tingkat kepadatan keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 13.061,53 km<sup>2</sup>. Rasio jenis kelamin tahun 2020 untuk semua kecamatan tidak jauh berbeda yaitu berkisar 95-98. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

**Tabel 2.5**  
**Sebaran Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020**

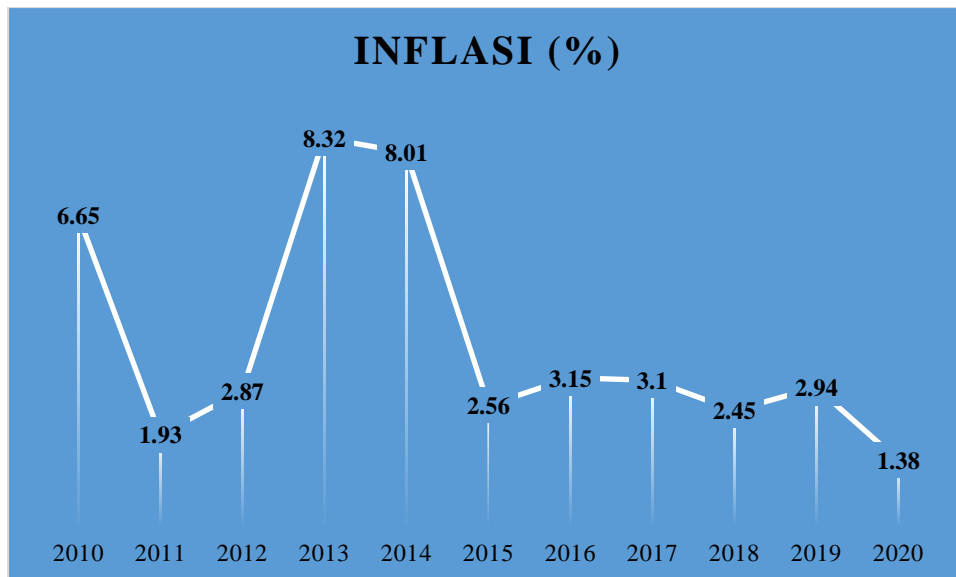
Kecamatan	Penduduk	Pertumbuhan 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
Laweyan	88.524	0,27	16,95	10.245,83	95,3
Serengan	47.778	0,88	9,15	14.977,43	95,3
Pasar Kliwon	78.517	0,54	15,03	16.289,83	98,4
Jebres	138.775	0,05	26,57	11.031,40	97,9
Banjarsari	168.770	0,68	32,31	11.395,68	96,6
Kota Surakarta	522.364	0,44	100,00	11.861,13	96,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

## 2.5. INFLASI

Sepanjang 2010-2020 inflasi di Surakarta terlihat berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai hanya 1,93% dan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang mencapai 8,32%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu dari 8,01% di tahun 2014 menjadi 2,56% di tahun 2015. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,94% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 2,45%.

Pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,38% sebagai akibat pandemi Covid-19. Situasi dan kondisi pandemi Covid-19 mendorong perekonomian berjalan stagnan bahkan menurun. Kelesuan ekonomi tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah bawah akibat penurunan sumber penghasilan, sehingga mendorong penurunan inflasi di tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

**Gambar 2.2**

**Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2010-2020**

Hingga tahun 2019 dilihat dari kelompok barang dan jasa, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di Kota Surakarta tahun 2019 yaitu sebesar 5,26% sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok kesehatan juga memberikan andil besar dalam inflasi tahun 2019 di Surakarta dengan kontribusi 4,21%. Kontribusi kelompok bahan makanan dalam inflasi 2019 meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2018.

**Tabel 2.6**

**Inflasi Tahun 2020**

Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi (%)
Umum	1,38
Makanan, minuman, dan tembakau	1,51
Pakaian dan alas kaki	2,6
Perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga	1,07
Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga	0,39
Kesehatan	3,76
Transportasi	-0,52
Informasi, komunikasi, jasa keuangan	-0,09
Rekreasi, olah raga, budaya	1,05
Pendidikan	-2,16
Peyediaan makanan dan minuman/restoran	5,37
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Berdasarkan pendekatan ini inflasi di Surakarta tahun 2020 mencapai 1,01% dan inflasi ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 4,65% atau dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2,52% dan tahun 2019 yang mencapai 2,14%. Sektor yang memiliki tingkat inflasi cukup besar pada tahun 2020 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,86% dan sektor transportasi dan pergudangan yaitu 5,52%. Sektor yang menunjukkan terjadinya deflasi adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu -0,51% serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -0,45%.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Inflasi Sektoral Tahun 2011-2020**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2011</b>	<b>2016</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,40	6,00	3,39	2,35
B. Pertambangan dan Penggalian	4,01	1,60	1,55	3,80
C. Industri Pengolahan	10,63	4,48	2,12	3,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,59	7,29	0,38	-0,51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,59	1,61	1,42	5,86
F. Konstruksi	4,66	1,76	3,11	0,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,39	2,88	2,75	2,20
H. Transportasi dan Pergudangan	0,64	0,56	2,03	5,52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,39	3,96	1,22	-0,45
J. Informasi dan Komunikasi	0,50	0,05	1,00	0,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,91	3,05	1,42	0,71
L. Real Estate	2,64	1,72	1,81	1,97
M,N. Jasa Perusahaan	5,91	4,09	1,55	2,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	5,42	1,51	1,14
P. Jasa Pendidikan	18,85	3,21	2,82	2,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	0,80	1,02	3,76
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,24	4,11	0,67	2,86
Produk Domestik Regional Bruto	4,64	2,52	2,14	1,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

## **2.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar

kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan menggunakan metode baru BPS, IPM dihitung berdasarkan 4 ukuran yang meliputi: (1) angka harapan hidup, (2) harapan lama sekolah, (3) rata-rata lama sekolah, serta (4) pengeluaran perkapita. Angka melek huruf dalam metode baru IPM dihilangkan karena dianggap sudah kurang relevan lagi saat ini.

Nilai maksimum dan minimum komponen IPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

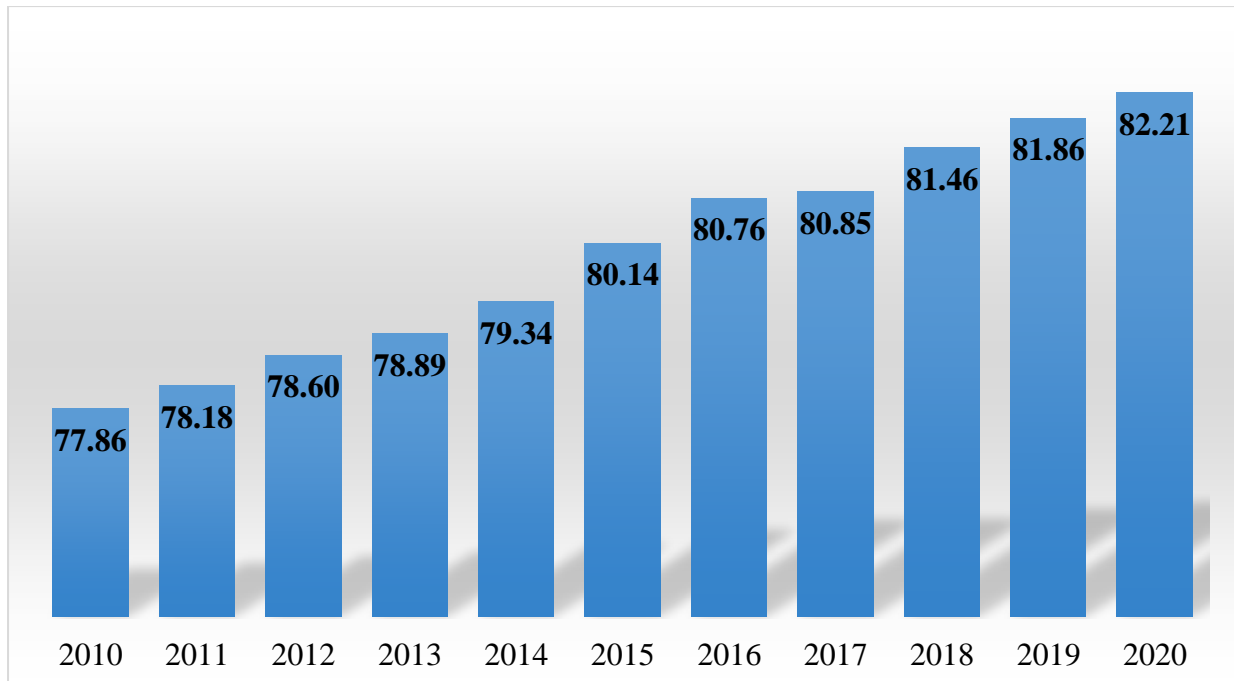
**Tabel 2.8**  
**Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352 ** (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Dari sisi nilai indeks pembangunan manusia (IPM), pada tahun 2019 nilai IPM Surakarta cukup tinggi yaitu 81,86 dan tahun 2020 naik menjadi 82,21. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, serta pengeluaran perkapita. Sepanjang 2010-2020 nilai IPM menunjukkan kenaikan setiap tahun. Kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017. Nilai IPM

Surakarta ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembangunan sumber daya manusia Surakarta menunjukkan keberhasilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

Bila dibandingkan dengan beberapa kota lain di Jawa Tengah, Kota Surakarta memiliki nilai yang lebih tinggi untuk keempat komponen IPM bila dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional, namun nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga. Dari sisi besarnya kenaikan selama 2019-2020, komponen HLS Kota Surakarta memiliki kenaikan sebesar 0,32 atau 2,20%, di bawah Kota Magelang yang naik sebesar 0,33 atau 2,39%. Untuk IPM secara keseluruhan pada periode 2019-2020 Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 0,35 (tertinggi dibandingkan rata-rata daerah di Jawa Tengah) dari 81,86 menjadi 82,21. Pada komponen pengeluaran perkapita, semua daerah mengalami penurunan selama 2019-2020. Penurunan untuk Kota Surakarta adalah Rp288.000 atau turun sebesar -1,91%. Angka penurunan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah.

Tabel 2.9

## Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020

Wilayah	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Perkapita (ribuan/orang/tahun)		IPM	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kota Magelang	76,75	76,85	13,81	14,14	10,33	10,39	12.514	12.210	78,8	78,99
<b>Kota Surakarta</b>	<b>77,12</b>	<b>77,22</b>	<b>14,55</b>	<b>14,87</b>	<b>10,54</b>	<b>10,69</b>	<b>15.049</b>	<b>14.761</b>	<b>81,86</b>	<b>82,21</b>
Kota Salatiga	77,22	77,4	15,34	15,41	10,41	10,42	15.944	15.699	83,12	83,14
Kota Semarang	77,25	77,34	15,51	15,52	10,52	10,53	15.550	15.243	83,19	83,05
Kota Pekalongan	74,28	74,38	12,83	12,84	8,71	8,96	12.680	12.467	74,77	74,98
Kota Tegal	74,34	74,46	13,04	13,05	8,31	8,51	13.250	12.999	74,93	75,07
Provinsi Jawa Tengah	74,23	74,37	12,68	12,70	7,53	7,69	11.102	10.930	71,73	71,87
Indonesia	71,34	71,47	12,95	12,98	8,34	8,48	11.299	11.013	71,92	71,94
Rata-rata Jawa Tengah	74,78	74,91	12,85	12,92	7,76	7,89	11.217	11.018	72,39	72,51
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	76,16	76,28	14,18	14,31	9,80	9,92	14.165	13.897	79,45	79,57

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 2.10

## Komponen IPM Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020

Wilayah	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita (ribuan/orang/tahun)		IPM	
	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)	(+/-)	(%)
Kota Magelang	0,10	0,13	0,33	2,39	0,06	0,58	(304)	-2,43	0,19	0,24
<b>Kota Surakarta</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,32</b>	<b>2,20</b>	<b>0,15</b>	<b>1,42</b>	<b>(288)</b>	<b>-1,91</b>	<b>0,35</b>	<b>0,43</b>
Kota Salatiga	0,18	0,23	0,07	0,46	0,01	0,10	(245)	-1,54	0,02	0,02
Kota Semarang	0,09	0,12	0,01	0,06	0,01	0,10	(307)	-1,97	-0,14	-0,17
Kota Pekalongan	0,10	0,13	0,01	0,08	0,25	2,87	(213)	-1,68	0,21	0,28
Kota Tegal	0,12	0,16	0,01	0,08	0,20	2,41	(251)	-1,89	0,14	0,19
Provinsi Jawa Tengah	0,14	0,19	0,02	0,16	0,16	2,12	(172)	-1,55	0,14	0,20
Indonesia	0,13	0,18	0,03	0,23	0,14	1,68	(286)	-2,53	0,02	0,03
Rata-rata Jawa Tengah	0,13	0,17	0,07	0,54	0,13	1,68	(199)	-1,77	0,12	0,17
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,12	0,16	0,12	0,88	0,11	1,16	(268)	-1,89	0,13	0,16

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

## BAB III

### KONSEP DAN METODOLOGI

#### 3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: *pertama*, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. *Kedua*, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan *bottom-up planning*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan *bottom-up* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan

daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan di masa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut usia semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.

4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan



dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumah tangga. Dimasa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah

sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, maka perlu dirumuskan *grand design* kependudukan. *Grand design* ini diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. *Grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

### **3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal**

Masalah kependudukan yang sering kali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersedianya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumber daya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward* dan *backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..*the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sector partners to create better conditions for economic growth and employment generation.*”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut *International Labour Organization* (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

### **3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau

keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut hukum Okun (Okun's Law) pengangguran memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Output dari perekonomian tergantung dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam proses produksi sehingga terdapat hubungan positif antara output dengan tenaga kerja. Mengingat angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, maka semakin tinggi output semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja dan semakin rendah pengangguran.

Namun penelitian hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi variabel lain seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, dan sebagainya. Artinya, pertumbuhan ekonomi misal 2% tidak secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran 2% pula.

### **3.4. Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan

sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen (1997)<sup>1</sup> serta Adam (2002)<sup>2</sup>. Penelitian lain seperti Lin di China (2008)<sup>3</sup> dan H. Bhanumurthy dan H. Mitra (2004)<sup>4</sup> di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam

---

<sup>1</sup> Ravallion, M dan S Chen (1997) 'What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?' World Bank Economic Review. Vol. 11(2).

<sup>2</sup> Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.

<sup>3</sup> Lin (2003), Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China, Asian Development Review, vol. 20, no. 2.

<sup>4</sup> HBhanumurthy and HMitra (2004), Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods, Asian Development Review, vol. 21, no. 2

kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dalam berbagai bentuk dan pengertiannya merupakan masalah yang dapat muncul setiap saat sepanjang waktu di setiap daerah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik karena proses pembangunan itu sendiri maupun karena struktur dan kultur masyarakat.

### **3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam). Selain itu

ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\sum (Y_i - Y_{rata2})^2 F_i / N}{Y} \right\}^{0,5}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan riil per kapita kabupaten/kota

Y<sub>i</sub> = Pendapatan perkapita kecamatan

F<sub>i</sub> = Jumlah penduduk kecamatan

N = Jumlah penduduk kabupaten/kota

Teori tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dengan pendapatan per kapita membentuk kurva U terbalik (*inverted U shape*). Pada intinya, teori tersebut menyatakan bahwa ketimpangan mula-mula akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, hingga pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hipotesis Kuznets tersebut tidak berlaku mutlak karena karakteristik yang berbeda antar wilayah. Selain itu, ketimpangan juga terkait dengan banyak hal.

Ketimpangan berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar di setiap golongan baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang di dalamnya banyak penduduk berpenghasilan rendah yang bekerja. Secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang tidak didominasi penduduk berpenghasilan rendah ke golongan penduduk yang berpenghasilan rendah.

### 3.6. Konsentrasi Kemiskinan

Untuk melihat pola konsentrasi kemiskinan di Indonesia digunakan indeks Entropy Theil. Kelebihan indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara.

Nilai indeks Entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah



kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah (*betwen region inequality*) dan kesenjangan dalam satu daerah (*within region inequality*). Di samping itu, indeks entropi Theil juga dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sebagaimana indeks Williamson.

Indeks Theil dirumuskan sebagai berikut:

$$IT = \sum (x_j / X) x \text{Log} \left( \frac{x_j / X}{y_j / Y} \right)$$

Keterangan:

IT = Indeks Entropi Theil

X<sub>j</sub> = Jumlah penduduk miskin (pendapatan perkapita) di wilayah (kecamatan)

X = Rata-rata jumlah penduduk miskin (pendapatan perkapita) di Kota Surakarta

y<sub>j</sub> = Jumlah penduduk di wilayah (kecamatan)

Y = Jumlah penduduk di Kota Surakarta

Intensitas kemiskinan juga merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu daerah. Menurut KPPOD Departemen Daam Negeri, kriteria tingkat keparahan kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : apabila  $I \leq \text{mean} + \text{Sd}$
- Tinggi : apabila  $\text{mean} + 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + \text{Sd}$
- Sedang : apabila  $\text{mean} - 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + 0,5\text{Sd}$
- Rendah : apabila  $I < \text{mean} - 0,5\text{Sd}$

Dalam hal ini, I=indikator tertentu yang dipergunakan (misal Gini Ratio, Indeks Williamson, atau Indeks Theil), *mean*= rata-rata hitung, *Sd*=deviasi standar.

### 3.7. Metodologi

#### 3.7.1. Pendekatan Kajian

Untuk menghitung Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dibutuhkan data PDRB dan kemiskinan di kecamatan. Data PDRB kecamatan dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

##### a. Pendekatan proporsi

PDRB kecamatan saat ini di proxy berdasarkan PDRB kecamatan tahun yang sebelumnya. Bila misal PDRB Tahun 2011 adalah 100 milyar, maka akan ditentukan proporsi PDRB tersebut di masing-masing kecamatan. Selanjutnya proporsi tersebut dipergunakan sebagai proxy PDRB tahun-tahun mendatang

##### b. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam pendekatan pengeluaran atau penggunaan, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan inventori dan ekspor netto. Peranan konsumsi rumah tangga cukup besar dalam PDRB, sehingga pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share konsumsi kecamatan}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

c. Pendekatan Penduduk yang Bekerja

PDRB menurut produksi mengandung makna bahwa PDRB merupakan total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi, sementara tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Suplai dari tenaga kerja adalah penduduk, yang dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja. Dengan demikian, untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap factor selain tenaga adalah *ceteris paribus*, sehingga hanya factor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan factor lainnya konstan. Atas dasar hal tersebut PDRB tingkat kecamatan di proxy dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share jumlah penduduk kecamatan yang bekerja}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

Dalam hal jumlah penduduk yang bekerja di tingkat kecamatan tidak tersedia, proxy dilakukan dengan menggunakan *share* jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

### 3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data

Data dalam kajian ini bersumber dari BPS Kota Surakarta berupa Kota Surakarta Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, serta PDRB Kota Surakarta. Ketersediaan data adalah sebagai berikut:

- a. PDRB Kecamatan Tahun 2009, 2010, 2011, dan 2019
- b. Jumlah penduduk per kecamatan
- c. Jumlah keluarga miskin (prasejahtera) per kecamatan (Kota Surakarta Dalam Angka)

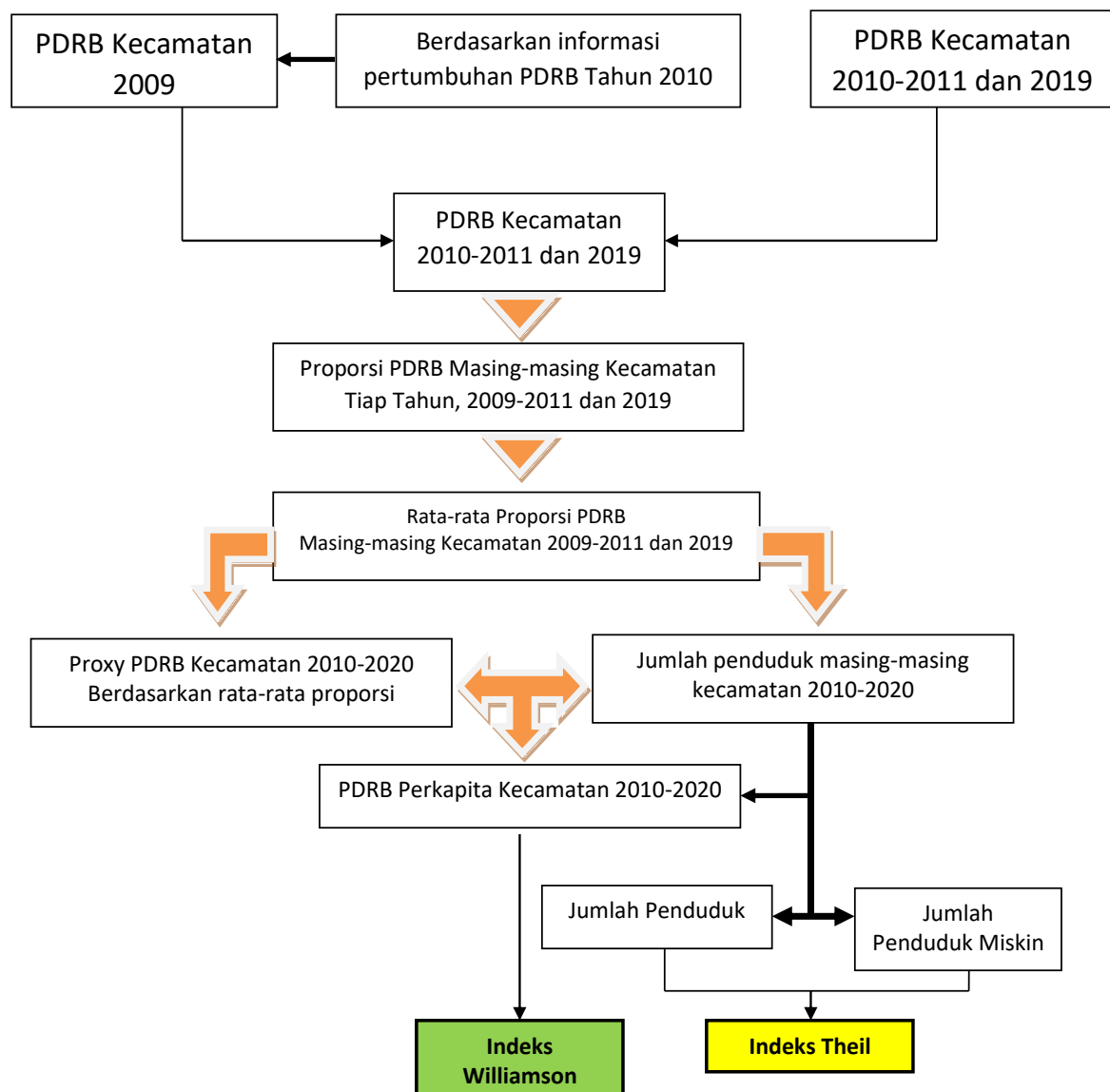
Berdasarkan ketersediaan data di atas, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan proporsi PDRB. Pendekatan ini dipandang lebih rasional dibandingkan dengan pendekatan proporsi jumlah penduduk, mengingat pendekatan proporsi jumlah penduduk dapat menimbulkan distorsi dalam proxy PDRB karena belum jelasnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja. Untuk pendekatan proporsi PDRB, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa proporsi PDRB per kecamatan selama 2010-2020 adalah sama, berdasarkan pertimbangan

perhitungan deviasi standar dan koefisien variasi yang kecil. Apabila terdapat perubahan proporsi maka perubahan tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat kecil.

### 3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan

- a. Pertama, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi PDRB Kecamatan Tahun 2009-2011 dan 2019 sesuai dengan ketersediaan data.
- b. Kedua, dilakukan penghitungan proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2009-2011, dan 2019.
- c. Ketiga, dilakukan penghitungan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2009-2011, dan 2019.
- d. Keempat, penggunaan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan untuk proxy PDRB kecamatan.

### 3.7.4. Kerangka Pikir Kajian



## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

##### **4.1.1. Analisis Proporsi dan Pertumbuhan**

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 triliun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 triliun, namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai akibat pandemi Covid-19 sehingga PDRB ADHB Kota Surakarta turun menjadi Rp47,6 triliun atau turun sebesar -0,75% dibanding tahun 2019. Secara relatif, selama 2010-2019 kenaikan terbesar adalah sektor jasa Pendidikan sebesar 236,45% dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 192,19%. Sektor dengan kenaikan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yang menunjukkan penurunan sebesar -51,74 selama 2010-2019.

Bila dihitung pada periode 2019-2020 yaitu masa pandemi Covid-19, sektor informasi dan komunikasi pada PDRB ADHB menunjukkan kenaikan tertinggi yaitu 20,21% disusul kemudian sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,32%. Sementara itu pada periode yang sama, sektor dengan penurunan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -60,63% serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -16,05%. Penurunan tersebut memiliki keterkaitan erat Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata dan kota perdagangan, sehingga aspek transportasi serta akomodasi makanan dan minum terdampak langsung secara signifikan.

Dari sisi struktur PDRB, pada tahun 2019 PDRB Surakarta didominasi oleh kontribusi sektor konstruksi sebesar 27,11%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,16%, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,01%. Sementara itu pertumbuhan tahun 2019 berdasarkan harga yang berlaku untuk sektor konstruksi adalah 7,89%, sektor perdagangan besar dan eceran 8,08%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,22%. Proporsi dan pertumbuhan ketiga sektor tersebut cukup besar dan menopang lebih dari 50% PDRB Surakarta. Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 proporsi sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran sedikit mengalami penurunan masing-masing menjadi 27,04% dan 21,63% sementara sektor informasi dan komunikasi menunjukkan kenaikan proporsi menjadi 14,54%.

Sebagian besar sektor menunjukkan penurunan nilai PDRB ADHB di tahun 2020 sehingga menyebabkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi yang pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan dari sisi proporsi dan nilai PDRB adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor jasa kesehatan dan jasa sosial. Sektor pertambangan dan penggalian memang menunjukkan peningkatan namun dalam arti semakin kecil nilai penurunannya.

**Tabel 4.1**  
**Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2011-2020**

Lapangan Usaha	Proporsi				Pertumbuhan				2019-2020		Tren 2011-2020	
	2011	2016	2019	2020	2011	2016	2019	2020	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,52	0,52	0,49	0,51	15,17	7,25	6,46	4,32	Naik	Turun	Turun	Turun
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	1,15	-63,94	-2,59	Turun	Naik	Turun	Turun
C. Industri Pengolahan	8,08	8,62	8,46	8,45	18,11	8,37	8,12	-0,87	Turun	Turun	Naik	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,20	0,20	0,20	8,81	13,99	5,61	1,08	Naik	Turun	Turun	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,15	0,14	0,16	3,98	4,05	6,23	9,27	Naik	Naik	Turun	Naik
F. Konstruksi	27,04	26,98	27,11	27,04	6,66	8,30	7,89	-0,98	Turun	Turun	Naik	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,42	22,48	22,16	21,63	14,20	7,62	8,08	-3,09	Turun	Turun	Turun	Turun
H. Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,63	2,59	1,03	5,21	5,90	9,49	-60,63	Turun	Turun	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	5,83	5,41	4,58	13,98	9,29	6,49	-16,05	Turun	Turun	Turun	Turun
J. Informasi dan Komunikasi	11,13	10,45	12,01	14,54	9,04	6,19	11,22	20,21	Naik	Naik	Naik	Naik
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,66	3,86	3,76	3,90	11,72	11,21	5,92	2,86	Naik	Turun	Naik	Turun
L. Real Estate	4,17	4,12	3,85	3,97	9,92	8,29	4,85	2,41	Naik	Turun	Turun	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,67	0,82	0,86	0,81	17,76	12,82	11,23	-6,36	Turun	Turun	Naik	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	5,96	5,40	5,39	4,84	7,89	5,47	-1,04	Turun	Turun	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,42	5,34	5,51	5,64	34,37	7,45	8,98	1,69	Naik	Turun	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,10	1,12	1,31	20,06	7,96	7,27	16,32	Naik	Naik	Naik	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,99	0,95	0,95	0,84	6,62	10,45	8,15	-11,87	Turun	Turun	Turun	Turun
PDRB	100	100	100	100	11,36	8,01	8,04	-0,75				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

Bila menggunakan pendekatan harga konstan tahun 2010, selama periode pandemi Covid-19 yaitu 2019-2020 terlihat secara riil hanya ada dua sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, namun karena sektor lainnya turun akibatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga menunjukkan penurunan tajam. Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan sangat tajam adalah sektor transportasi dan pergudangan (-62,69%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-15,67%), sektor jasa lainnya (-14,32%), sektor jasa perusahaan (-8,53%). Selain itu, sektor yang menopang PDRB cukup besar khususnya sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang negatif yang cukup besar yaitu masing-masing -5,18% serta -4,01%. Hal ini menjadi pemicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang negatif yaitu -1,74% di tahun 2020.

**Tabel 4.2**  
**Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2019-2020**

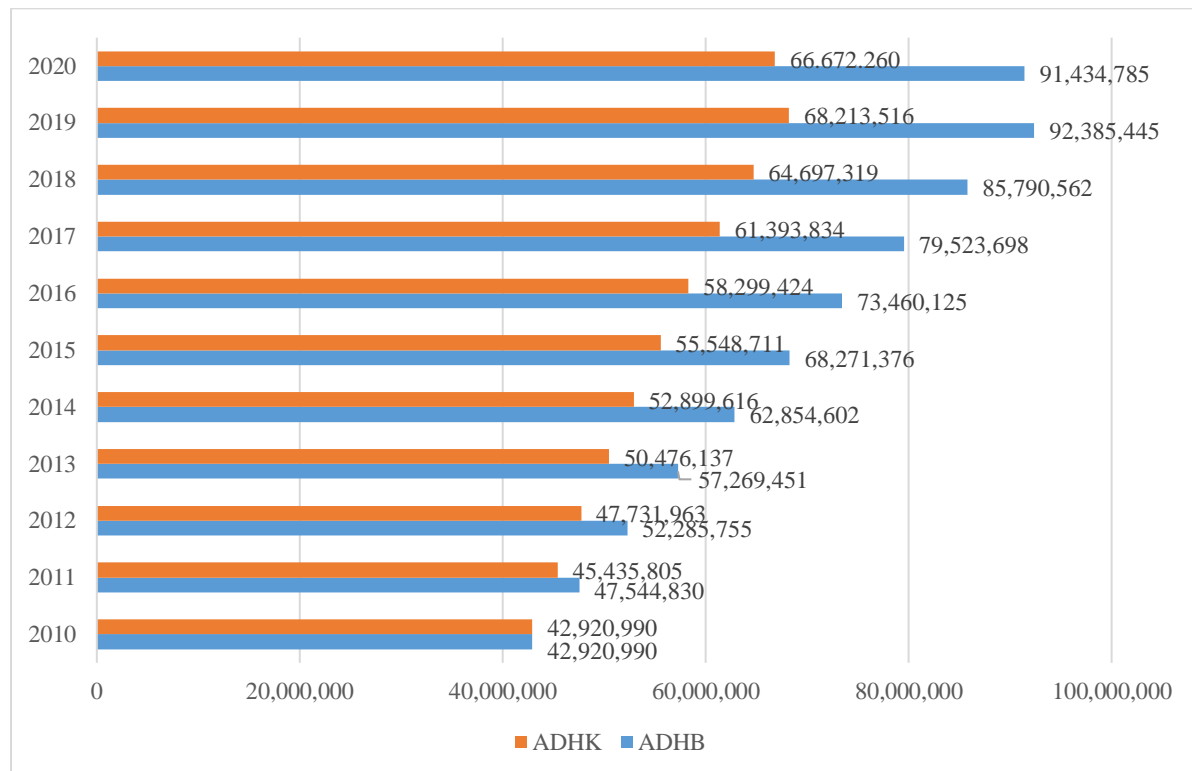
Sektor (Lapangan Usaha)	PROPORSI		PERTUMBUHAN		PROPORSI	PERTUMBUHAN
	2019	2020	2019	2020		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	0,43	2,97	1,92	Naik	Turun
B. Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	-64,49	-6,15	Turun	Naik
C. Industri Pengolahan	7,64	7,46	5,88	-4,01	Turun	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,23	5,21	1,60	Naik	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	4,74	3,22	Naik	Turun
F. Konstruksi	25,65	25,59	4,63	-1,95	Turun	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,15	22,34	5,18	-5,18	Turun	Turun
H. Transportasi dan Pergudangan	2,91	1,10	7,32	-62,69	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,97	4,26	5,21	-15,67	Turun	Turun
J. Informasi dan Komunikasi	15,22	18,54	10,12	19,70	Naik	Naik
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,46	4,44	2,13	Naik	Turun
L. Real Estate	4,17	4,26	2,98	0,43	Naik	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,79	0,74	9,53	-8,53	Turun	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	5,06	3,90	-2,15	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,22	4,25	5,98	-0,96	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,22	6,19	12,11	Naik	Naik
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,01	0,88	7,44	-14,32	Turun	Turun
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	5,78	-1,74	Naik	Turun
PDRB	100,00	100,00	5,78	-1,74		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

#### 4.1.2. Analisis PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Berdasarkan perhitungan PDRB ADHK dan ADHB, selama 2010-2019 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2019 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp92,3 juta dan ADHK sebesar Rp68,2 juta. Secara nominal, PDRB perkapita tahun 2019 naik sebesar 7,69% sementara secara riil naik sebesar 5,43%. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2019 terlihat berfluktuasi. Kenaikan yang terjadi di tahun 2019 sendiri lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2018.

Selanjutnya di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita akibat dampak pandemi Covid-19. Terdampaknya perekonomian Kota Surakarta tersebut membuat perekonomian tertekan dan di saat yang sama hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk Kota Surakarta. PDRB perkapita ADHK tahun 2020 turun sebesar -2,26% dari Rp68,2 juta menjadi Rp66,6 juta. Bila dihitung menggunakan PDRB ADHB, tingkat penurunan tahun 2020 adalah -1,03%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

**Gambar 4.1**  
**Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2010-2020**

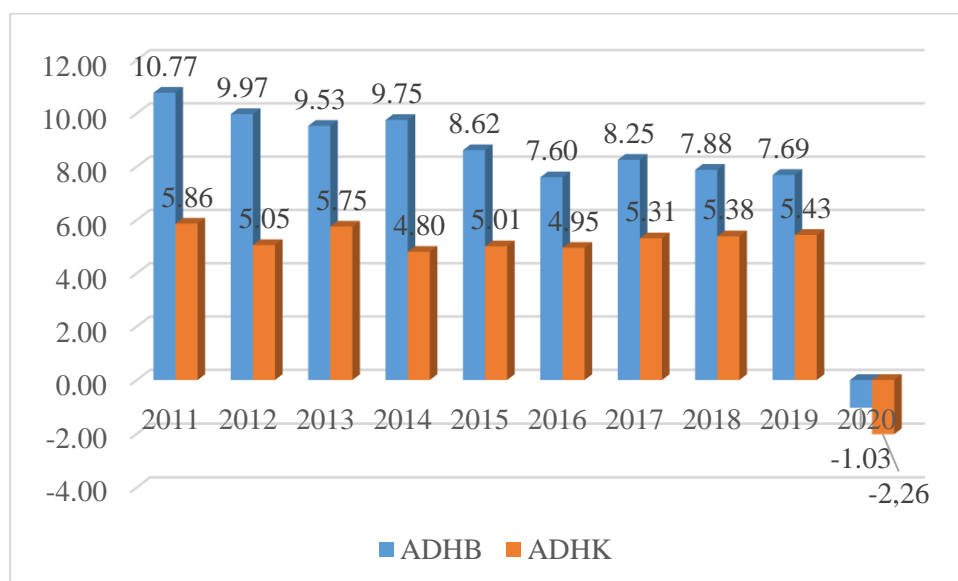
PDRB perkapita yang terjadi di tahun 2020 tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK dari 5,43% di tahun 2019 menjadi -2,26% di tahun 2020 sama artinya dengan terjadi penurunan PDR ADHK sebesar -7,69%. Untuk mengembalikan ke posisi semula hanya dapat dilakukan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan dipastikan memerlukan proses penyesuaian. Kebijakan pemerintah yang melanjutkan PSBB dan PPKM serta larangan mudik idul fitri di tahun 2021 menjadikan tantangan Kota Surakarta menjadi semakin tidak ringan khususnya di tahun 2021 sebagai titik awal pemulihan ekonomi.

**Tabel 4.3**

**Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2011-2020**

PDRB	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	10,77	9,97	9,53	9,75	8,62	7,60	8,25	7,88	7,69	-1,03
ADHK	5,86	5,05	5,75	4,80	5,01	4,95	5,31	5,38	5,43	-2,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Gambar 4.2**

**Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2010-2020**

Bila dibandingkan dengan wilayah lain, penurunan PDRB perkapita ADHK Kota Surakarta masih lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -



7,44%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah yang pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita sebesar -6,99%. Bila dibandingkan secara nasional, pada tahun 2020 PDRB perkapita nasional juga menunjukkan penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan Kota Surakarta yaitu -2,84%. Bila diperbandingkan antar kota di Jawa Tengah, penurunan PDRB perkapita Kota Surakarta hanya lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Tegal yang mengalami penurunan sebesar -10,79%.

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Tahun 2019-2020**

WILAYAH	2019	2020	(Naik/Turun)	(%)
Kota Magelang	53.005.376,34	51.956.349,61	-1.049.026,73	-1,98
<b>Kota Surakarta</b>	<b>68.213.515,87</b>	<b>66.672.259,75</b>	<b>-1.541.256,12</b>	<b>-2,26</b>
Kota Salatiga	49.803.201,99	49.412.769,77	-390.432,22	-0,78
Kota Semarang	77.288.253,01	83.428.666,33	6.140.413,33	7,94
Kota Pekalongan	24.348.740,10	23.890.066,38	-458.673,72	-1,88
Kota Tegal	44.838.330,09	40.001.218,81	-4.837.111,28	-10,79
Provinsi Jawa Tengah	28.570.404,12	26.443.974,14	-2.126.429,98	-7,44
Indonesia	40.843.249,60	39.683.355,66	-1.159.893,94	-2,84
Rata-rata Jawa Tengah	23.299.641,83	21.670.925,19	-1.628.716,63	-6,99
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	46.183.793,48	45.002.043,48	-1.181.750,00	-2,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari sisi nilainya, PDRB perkapita Kota Surakarta masih menduduki peringkat 2 di bawah Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi. Dengan demikian, iklim perekonomian di Kota Surakarta dapat dikatakan berjalan sangat dinamis. Dinamika perekonomian tersebut di sisi lain diimbangi dengan kemampuan Kota Surakarta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan PDRB perkapita yang tinggi sepanjang 2010-2020. Perhitungan dengan menggunakan PDRB ADHK atau PDRB perkapita riil pun juga masih menempatkan Kota Surakarta di peringkat 2 untuk kategori “kota” di provinsi Jawa Tengah sepanjang 2010-2020.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah Tahun**  
**2010-2019**

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	33.867.444	37.516.358	40.933.765	44.686.250	49.205.553	53.650.729	57.995.080	62.614.803	67.294.610	72.145.717	71.272.470
Kota Surakarta	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.854.602	68.271.376	73.460.125	79.523.698	85.790.562	92.385.445	91.434.785
Kota Salatiga	34.245.751	38.133.423	41.452.729	44.710.264	48.928.130	52.851.344	56.509.986	60.247.019	64.410.480	68.579.938	67.497.489
Kota Semarang	51.809.889	57.307.818	61.711.131	66.169.342	72.988.828	78.892.913	85.044.685	91.194.919	98.103.033	105.486.920	102.701.206
Kota Pekalongan	16.397.039	18.186.195	19.936.487	21.988.161	24.148.253	26.242.128	28.432.184	30.722.701	33.136.443	35.408.930	34.941.543
Kota Tegal	28.731.540	32.125.959	34.490.001	37.460.222	41.065.677	44.612.364	48.391.969	52.386.403	56.643.841	61.158.886	60.792.247

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

#### **4.1.3. Analisis Kredit Sektoral PDRB**

Dari sisi keuangan daerah lain yaitu kredit sektoral PDRB, kredit perbankan selama 2018-2020 yang terbesar adalah kredit pada sektor industri pengolahan yang berkisar antara 37% hingga 38% dan yang terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air dan sektor administrasi pemerintahan. Dalam struktur PDRB Kota Surakarta, sektor kontribusi memegang peranan terbesar yaitu 27% namun memiliki kredit sektoral yang relatif kecil yaitu di kisaran 4% dari total kredit yang disalurkan. Sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB memiliki kontribusi 8% namun justru memiliki proporsi kredit terbesar. Sektor perdagangan yang memiliki proporsi sekitar 21%-22% memiliki proporsi kredit sekitar 21%

Tabel 4.6

## Alokasi Kredit Perbankan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2018-2020

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Perikanan	1.348.622.178.240	1.588.736.397.075	1.481.044.337.897	2,36	2,61	2,48
Pertambangan dan Penggalian	44.821.231.394	84.145.007.686	44.797.870.745	0,08	0,14	0,07
Industri Pengolahan	21.362.476.115.245	22.746.753.418.411	22.771.540.237.939	37,43	37,31	38,10
Listrik, gas dan air	66.606.014.500	32.927.546.984	22.653.567.019	0,12	0,05	0,04
Konstruksi	2.289.389.056.990	2.969.815.451.990	2.776.353.557.580	4,01	4,87	4,65
Perdagangan Besar dan Eceran	12.754.944.656.899	13.219.166.084.386	12.726.943.755.383	22,35	21,68	21,30
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	1.873.559.396.896	2.107.682.597.284	2.145.697.043.893	3,28	3,46	3,59
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.708.893.695.075	2.878.885.207.636	2.727.170.443.642	4,75	4,72	4,56
Perantara Keuangan	497.530.292.477	384.194.068.946	305.811.420.245	0,87	0,63	0,51
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.163.460.455.174	1.249.006.514.854	1.290.655.794.223	2,04	2,05	2,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.197.782.751	9.825.940.392	9.778.204.815	0,01	0,02	0,02
Jasa Pendidikan	608.820.256.159	529.416.801.335	465.173.789.004	1,07	0,87	0,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.850.489.799	881.325.641.667	819.348.472.032	1,22	1,45	1,37
Lainnya	11.656.338.604.498	12.279.235.060.625	12.173.890.550.525	20,42	20,14	20,37
All	57.077.510.226.097	60.961.115.739.271	59.760.859.044.942	100,00	100,00	100,00

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kota Surakarta, diolah.

Meskipun industri pengolahan memiliki alokasi kredit sektoral terbesar, namun sektor ini justru memiliki posisi kredit yang bermasalah (*non performing loan* atau NPL) yang juga terbesar. Pada tahun 2020, sebesar 82,30% kredit di sektor industri pengolahan memiliki status NPL. Posisi NPL kedua adalah sektor perdagangan dengan NPL sebesar 7,48% dan yang ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum dengan NPL tahun 2020 sebesar 4,73%.

**Tabel 4.7**  
**Proporsi Non Performing Loan (NPL) Tahun 2020**

<b>Kredit Sektoral</b>	<b>Kredit</b>	<b>NPL</b>	<b>Persentase NPL</b>
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	1.416.367.239.891	21.585.591.476	0,28
Perikanan	64.677.098.006	607.731.896	0,01
Pertambangan dan Penggalian	44.797.870.745	1.375.833.332	0,02
Industri Pengolahan	22.771.540.237.939	6.425.131.777.235	82,30
Listrik, gas dan air	22.653.567.019	0	0,00
Konstruksi	2.776.353.557.580	91.691.666.023	1,17
Perdagangan Besar dan Eceran	12.726.943.755.383	584.159.509.466	7,48
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.727.170.443.642	368.929.196.960	4,73
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.145.697.043.893	1.878.454.644	0,02
Perantara Keuangan	305.811.420.245	3.493.684.178	0,04
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.290.655.794.223	8.748.883.929	0,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.778.204.815	717.771.106	0,01
Jasa Pendidikan	465.173.789.004	3.110.665.619	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	819.348.472.032	3.061.277.509	0,04
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	916.384.375.569	71.039.843.537	0,91
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	78.133.223.016	1.772.436.668	0,02
Kegiatan yang belum jelas batasannya	83.045.430.638	2.062.194.770	0,03
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	4.758.271.073.404	89.996.493.689	1,15
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	129.184.768.200	65.951.999	0,00
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	272.243.287.739	41.605.098.170	0,53
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	176.277.845.715	3.814.965.238	0,05
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna)	3.907.794.126.405	57.689.725.032	0,74
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.852.556.419.839	24.554.476.951	0,31
<b>Total Kredit</b>	<b>59.760.859.044.942</b>	<b>7.807.093.229.427</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kota Surakarta, diolah.

#### **4.2. ANALISIS KETENAGAKERJAAN**

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

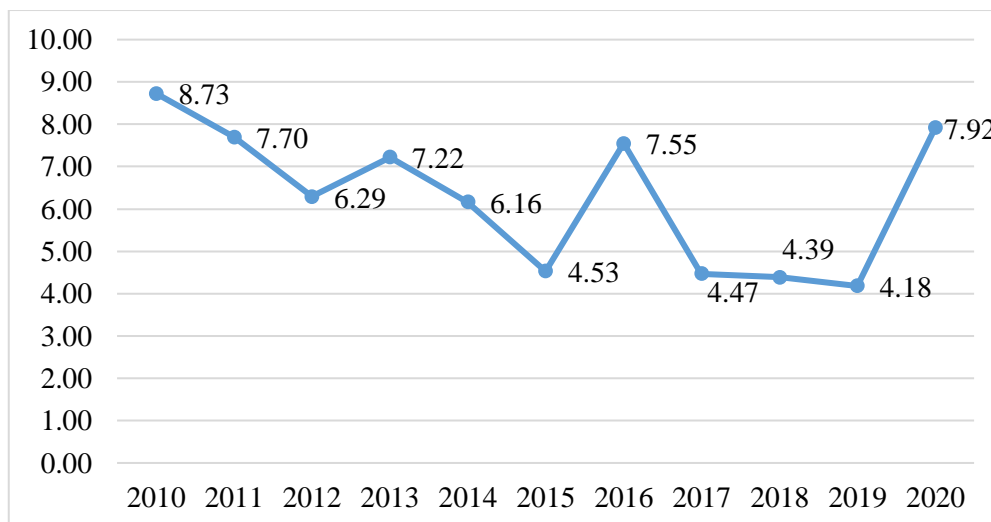
- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari sisi tingkat pengangguran, pada tahun 2019 tingkat pengangguran Surakarta mencapai 4,18% dan tahun 2020 naik tajam menjadi 7,92%. Tingkat pengangguran dihitung dai perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena lumpuhnya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Sepanjang 2010-2020 tingkat pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2010 yang mencapai 8,73% dan yang terendah adalah tingkat pegangguran pada tahun 2019. Tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

**Gambar 4.3**

### **Tingkat Pengangguran Tahun 2010-2020**

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 286.811 dengan jumlah pengangguran sebanyak 12.003. Tahun 2020 jumlah angkatan kerja menjadi 288.959 atau naik sebesar 0,74% dan jumlah pengangguran naik sangat tajam menjadi 22.877 atau naik 90,59% sebagai dampak dari pandemi Covid. Dengan pertambahan jumlah pengangguran tersebut maka tingkat

pengangguran Kota Surakarta tahun 2019 mencapai 4,18% dan tahun 2020 naik menjadi 7,92%.

Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2010-2019 menunjukkan tren peningkatan namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 92,08%. Penurunan kesempatan kerja ini juga terjadi pada periode 2012-2013 yang berarti tingkat pengangguran mengalami kenaikan.

**Tabel 4.8**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (orang)	258.573	263.562	278.535	287.511	275.191	284.076	n.a.	271.527	271.375	286.811	288.959
Jumlah Pengangguran (orang)	22.575	20.295	17.513	20.763	16.957	12.877	n.a.	12.133	11.910	12.003	22.877
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,27	92,30	93,71	92,78	93,84	95,47	n.a.	95,53	95,61	95,82	92,08
Tingkat Pengangguran (%)	8,73	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	7,55	4,47	4,39	4,18	7,92
TPAK	66,81	67,22	70,43	72,10	68,48	70,12	n.a.	66,10	65,62	68,93	68,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan data 2019-2020 tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2019 adalah lulusan perguruan tinggi yang mencapai 5,48%. Di tahun 2020, tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SLTP yang mencapai 8,65%. Bila dihitung kenaikan tingkat pengangguran selama 2019-2020, kenaikan tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SLTP dari 2,53% di tahun 2019 menjadi 8,65% di tahun 2020 sedangkan yang terkecil adalah lulusan perguruan tinggi dari 5,48% di tahun 2019 menjadi 7,14% di tahun 2020.

**Tabel 4.9**  
**Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020**

Pendidikan Tertinggi	Pengangguran Terbuka		Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
≤ SD	1.089	3.590	56.187	53.330	1,94	6,73
SLTP	1.123	4.307	44.346	49.788	2,53	8,65
SLTA	6.433	10.751	124.997	126.577	5,15	8,49
Perguruan Tinggi	3.358	4.229	61.281	59.264	5,48	7,14
<b>Jumlah</b>	<b>12.003</b>	<b>22.877</b>	<b>286.811</b>	<b>288.959</b>	<b>4,18</b>	<b>7,92</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Dari aspek jenis kelaminnya, tingkat pengangguran perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran laki-laki adalah 4,10% dan perempuan 4,29%. Di tahun 2020 tingkat pengangguran laki-laki naik menjadi 7,52% sedangkan perempuan 8,50%. Meskipun jumlah pengangguran perempuan lebih kecil, namun Angkatan kerja perempuan juga lebih kecil dibandingkan laki-laki sehingga menghasilkan tingkat pengangguran perempuan yang lebih besar.

**Tabel 4.10**

**Pengangguran Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020**

Pendidikan Tertinggi	Pengangguran Terbuka		Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Laki-laki	6473	12068	157824	160547	4,10	7,52
Perempuan	5530	10909	128987	128412	4,29	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Data yang menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha hanya tersedia di tahun 2018. Berdasarkan data tersebut bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi, maka terlihat pada tahun 2018 lalu sebagian besar penduduk yaitu 74.304 atau 28,64% bekerja di sektor perdagangan dan urutan kedua adalah yang bekerja di sektor industri pengolahan yang berjumlah 57.460 atau 22,15%. Di sektor konstruksi yang memiliki nilai proporsi terbesar dalam PDRB justru menyerap tenaga kerja yang tergolong kecil, yaitu hanya 3,63%. Hal ini bertolak belakang dengan sektor jasa lainnya yang memiliki proporsi kecil dalam PDRB (0,95%) namun mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu 10,45%. Hal yang sama juga terjadi dengan beberapa sektor lain seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang memiliki proporsi tidak besar dalam PDRB namun mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

**Tabel 4.11****Perbandingan Penduduk yang Bekerja dengan PDRB Tahun 2018**

Lapangan Usaha	Penduduk Bekerja		PDRB ADHB	
	Jumlah	(%)	Nilai (Juta Rp)	(%)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.998	0,77	219.281,71	0,49
B Pertambangan dan Penggalian	470	0,18	801,67	0,00
C Industri Pengolahan	57.460	22,15	3.755.201,87	8,45
D Pengadaan Listrik dan Gas	374	0,14	89.447,76	0,20
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.512	0,58	64.543,46	0,15
F Konstruksi	9.424	3,63	12.059.892,39	27,14
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	74.304	28,64	9.840.818,19	22,15
H Transportasi dan Pergudangan	14.992	5,78	1.133.736,50	2,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.573	11,78	2.438.524,86	5,49
J Informasi dan Komunikasi	3.148	1,21	5.182.973,52	11,67
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7.153	2,76	1.704.370,50	3,84
L Real Estat	759	0,29	1.760.865,00	3,96
M,N Jasa Perusahaan	7.228	2,79	372.415,59	0,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	6.868	2,65	2.459.805,65	5,54
P Jasa Pendidikan	12.839	4,95	2.425.953,87	5,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.252	1,25	499.078,89	1,12
R,S,T,U Jasa Lainnya	27.111	10,45	422.259,08	0,95
Total	259.465	100,00	44.429.970,52	100,00

Sumber: Pusdatin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Korelasi antara PDRB dengan jumlah pengangguran di Surakarta adalah erat yang ditunjukkan dengan nilai  $r^2$  adjusted sebesar 0,83 dengan koefisien regresi sebesar -0,00042. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti akan semakin mengurangi jumlah



pengangguran. Meski demikian, kecilnya koefisien regresi menunjukkan bahwa diperlukan kenaikan PDRB yang sangat besar untuk mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi mengurangi jumlah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui kebijakan alokasi APBD untuk program pemberdayaan masyarakat melalui dinas terkait. Kemiskinan dan pemerataan pendapatan tidak lepas dari peran serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta kuasa penggunaan anggaran untuk dapat merangsang perekonomian menuju ke arah yang lebih baik melalui APBD yang tentunya diharapkan akan mempercepat roda perekonomian. Dengan adanya perputaran cepat roda perekonomian diharapkan akan membuka peluang ekonomi baru yang tentunya akan menarik tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tidak lagi terpuruk pada jurang kemiskinan.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,914771
R Square	0,836807
Adjusted R Square	0,813493
Standard Error	1832,005
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30256,43	2402,37	12,59441	4,59E-06
PDRB-ADHB	-0,00042	6,94E-05	-5,99115	0,000547

Pengangguran akan mendorong munculnya kemiskinan akibat tidak adanya dana untuk keperluan sehari-hari. Secara teoritis, keduanya akan memiliki hubungan positif dalam arti, semakin tinggi jumlah pengangguran akan mendorong semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Nilai adjusted r2 sebesar 0,78 dengan koefisien yang tergolong kecil yaitu 0,001617.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,884287
R Square	0,781964
Adjusted R Square	0,750816
Standard Error	3,872371
Observations	9

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	30,51418	5,428057	5,621566	0,000798
Jumlah Pengangguran	0,001617	0,000323	5,010467	0,001547

Bila dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, tingkat pengangguran di tahun 2020 tersebut menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, provinsi, maupun nasional. Di antara kota lain sendiri, tingkat pengangguran Kota Surakarta tahun 2020 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Semarang (9,57%), Kota Magelang (8,59%) serta Tegal (8,40%). Dari tahun 2019-2020 tingkat pengangguran Kota Surakarta naik sebesar 3,74%, di bawah Kota Semarang dan Kota Magelang.

**Tabel 4.12**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Surakarta vs Kota Lain di Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2020**

<b>Wilayah</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>(Naik/Turun)</b>
Kota Magelang	4,43	8,59	4,16
<b><i>Kota Surakarta</i></b>	<b><i>4,18</i></b>	<b><i>7,92</i></b>	<b><i>3,74</i></b>
Kota Salatiga	4,43	7,44	3,01
Kota Semarang	4,54	9,57	5,03
Kota Pekalongan	5,77	7,02	1,25
Kota Tegal	8,07	8,40	0,33
Provinsi Jawa Tengah	4,49	6,48	1,99
Indonesia	5,28	7,07	1,79
Rata-rata Jawa Tengah	4,22	6,18	1,96
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	4,44	8,12	3,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah.

### **4.3. ANALISIS PROXY PDRB KECAMATAN**

Berdasarkan informasi PDRB kecamatan di Kota Surakarta. PDRB Kecamatan Banjarsari adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sedangkan PDRB terendah adalah PDRB Kecamatan Serengan. Dari sisi proporsinya, Kecamatan Banjarsari memiliki proporsi tertinggi dikarenakan memang memiliki PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Selama 2010-2012 dan 2019. Proporsi PDRB di setiap kecamatan terlihat konstan. Dengan mempertimbangkan perhitungan ini. proporsi PDRB masing-masing kecamatan diasumsikan konstan sehingga proporsi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proxy PDRB masing-masing kecamatan selama 2013-2018 dan 2020.

**Tabel 4.13****Proporsi PDRB Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2009-2011 dan 2019**

Kecamatan	2009	2010	2011	2019	2019-Penyesuaian
Laweyan	1.548.657	1.646.400	1.823.461	8.547.736	8.547.598
Serengan	1.222.377	1.292.295	1.428.536	5.486.016	5.485.927
Pasar Kliwon	1.998.290	2.129.530	2.365.362	9.701.250	9.701.094
Jebres	1.884.371	1.997.593	2.197.514	9.233.711	9.233.562
Banjarsari	2.693.858	2.875.319	3.178.097	15.034.336	15.034.094
PDRB ADHB	9.347.553	9.941.137	10.992.971	48.003.049	48.002.276

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

**Tabel 4.14****Proxy PDRB Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2010-2020**

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laweyan	3.624.230,27	4.036.030,41	4.460.795,34	4.909.155,83	5.412.394,93	5.903.276,07	6.376.055,06	6.928.271,91	7.912.697,1	8.547.598,50	8.555.901,93
Serengan	2.710.525,84	3.018.507,08	3.336.184,55	3.671.508,91	4.047.876,44	4.415.001,57	4.768.588,29	5.181.585,78	5.042.449,25	5.485.927,17	5.356.093,53
Pasar Kliwon	4.536.826,02	5.052.319,09	5.584.041,54	6.145.301,00	6.775.257,73	7.389.744,71	7.981.571,36	8.672.838,62	8.990.476,53	9.701.093,93	9.549.691,18
Jebres	4.265.948,55	4.750.663,39	5.250.638,62	5.778.387,32	6.370.731,60	6.948.529,79	7.505.020,61	8.155.014,81	8.583.128,16	9.233.562,24	9.117.005,43
Banjarsari	6.332.020,61	7.051.491,16	7.793.612,97	8.576.959,40	9.456.186,19	10.313.821,95	11.139.830,82	12.104.628,36	13.901.219,46	15.034.094,15	15.065.871,61
PDRB	21.469.551,30	23.909.011,13	26.425.273,02	29.081.312,47	32.062.446,90	34.970.374,09	37.771.066,12	41.042.339,48	44.429.970,52	48.002.275,99	47.644.563,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

**Tabel 4.15****Proxy PDRB Perkapita Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2010-2020**

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laweyan	32,60	36,11	41,07	44,80	49,54	53,84	62,31	68,46	77,67	83,37	96,65
Serengan	42,17	47,54	54,91	60,23	66,63	72,11	87,26	96,09	92,82	100,34	112,10
Pasar Kliwon	50,98	56,66	62,02	67,91	74,27	80,63	92,08	103,09	104,12	111,65	121,63
Jebres	29,54	32,61	35,87	39,16	42,92	46,54	51,33	56,56	58,77	62,52	65,70
Banjarsari	35,73	39,62	45,01	48,08	53,92	58,72	61,54	67,68	76,75	81,95	89,27
<b>Rata-rata</b>	<b>38,20</b>	<b>42,51</b>	<b>47,78</b>	<b>52,04</b>	<b>57,45</b>	<b>62,37</b>	<b>70,90</b>	<b>78,38</b>	<b>82,03</b>	<b>87,97</b>	<b>97,07</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

**Tabel 4.16****Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010-2020**

Penduduk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laweyan	94.883	95.568	94.817	94.791	95.266	95.598	92.168	92.887	92.606	92.607	88.524
Serengan	54.867	54.289	53.039	52.734	52.969	53.387	49.221	49.495	49.381	49.383	47.778
Pasar Kliwon	75.960	76.241	78.605	78.289	79.535	79.912	78.069	77.219	78.495	78.485	78.517
Jebres	123.246	124.586	127.779	127.652	129.425	130.175	131.686	132.337	132.765	133.407	138.775
Banjarsari	151.255	152.189	151.161	154.332	152.911	153.154	163.027	164.164	164.639	165.705	168.770
<b>Rata2</b>	<b>100.042</b>	<b>100.575</b>	<b>101.080</b>	<b>101.560</b>	<b>102.021</b>	<b>102.445</b>	<b>102.834</b>	<b>103.220</b>	<b>103.577</b>	<b>103.917</b>	<b>104.473</b>
<b>Jumlah</b>	<b>500.211</b>	<b>502.873</b>	<b>505.401</b>	<b>507.798</b>	<b>510.105</b>	<b>512.226</b>	<b>514.171</b>	<b>516.102</b>	<b>517.887</b>	<b>519.587</b>	<b>522.364</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

**Tabel 4.17****Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Tahun 2010-2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Laweyan	11.253	9.868	7.566	6.490	7.671	7.077	6.641	7.460	6.996
Serengan	5.157	6.211	4.933	3.881	3.934	3.630	4.244	4.918	5.171
Pasar Kliwon	7.432	7.383	9.817	8.881	9.366	9.118	8.149	6.353	6.739
Jebres	16.985	15.715	17.764	17.333	18.732	17.288	12.270	11.715	10.179
Banjarsari	19.873	20.532	15.840	19.126	16.270	17.778	15.687	14.754	17.945
Jumlah	60.700	59.700	55.920	55.710	55.910	54.890	46.990	45.200	47.030
Rata-rata	12.140	11.940	11.184	11.142	11.182	10.978	9.398	9.040	9.406

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan proxy di atas, Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan dengan PDRB tertinggi sedangkan Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan PDRB terendah. Namun bila dilihat dari sisi PDRB perkapita maka Kecamatan Pasar Kliwon memiliki merupakan kecamatan dengan yang memiliki PDRB perkapita tertinggi sementara Kecamatan Jebres memiliki PDRB perkapita terendah. Hal ini disebabkan oleh factor jumlah penduduk. Dalam jumlah penduduk, Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan dengan yang penduduk terbesar sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk yang terkecil. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin, dengan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk miskin paling kecil sedangkan Kecamatan banjarsari memiliki jumlah penduduk miskin terbesar.

#### **4.4. ANALISIS KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 dan di tahun 2019 tingkat kemiskinan kembali turun 8,70%, namun tingkat kemiskinan Kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2020 menjadi 9,03%. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang mengalami kenaikan dibandingkan 2019, dari 45.200 menjadi 47.030. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena penurunan bahkan hilangnya penghasilan akibat situasi pandemi Covid-19 sementara garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin di tahun 2020 menunjukkan kenaikan.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2020 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,51 sedangkan nilai indeks keparahan

kemiskinan atau P2 sebesar 0,38, menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Indeks P1 menunjukkan besarnya pengeluaran penduduk terhadap gris kemiskinan, sehingga menurunnya angka P1 tersebut diduga karena banyaknya kelompok miskin baru yang sebelumnya di atas garis kemiskinan, namun saat itu berada tidak jauh di bawah garis kemiskinan. Hal yang sama juga terjadi pada indeks P2 yang di tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sebagai akibat adanya kelompok miskin yang baru.

**Tabel 4.18**  
**Indikator Kemiskinan Surakarta Tahun 2010-2020**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	69,80	64,50	60,70	59,70	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99	45,20	47,03
Tingkat Kemiskinan	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	8,70	9,03
Indeks Kedalaman Kemiskinan=P1	2.19	1.89	1.33	1.63	1.48	1.74	1.34	1.87	1.47	1.60	1,51
Indeks Keparahan Kemiskinan=P2	0,53	0,46	0,28	0,34	0,30	0,40	0,35	0,44	0,35	0,48	0,38
Garis Kemiskinan	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063	473.516	487.445

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Bila dikaitkan dengan PDRB ADHK, selama 2010-2020 pola antara PDRB dengan jumlah penduduk miskin memiliki karakteristik berbanding terbalik, yang berarti semakin tinggi PDRB semakin berkurang jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah  $r=0,96$  dengan nilai koefisien determinasi disesuaikan ( $r^2$  adjusted)=0,92. Hal ini berarti kenaikan PDRB di Surakarta membawa dampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Bila PDRB ADHK naik sebesar 5% (perekonomian tumbuh sebesar 5%) dari 34.827.188 (jutaan) menjadi 36.568.547 (jutaan), maka ditaksir jumlah penduduk miskin akan turun dari 47.030 menjadi 44.060.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,964656
R Square	0,93056
Adjusted R Square	0,922845
Standard Error	2,111899
Observations	11

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	99,21459	3,983293	24,90768	1,3E-09
PDRB-ADHK	-1,5E-06	1,37E-07	-10,9822	1,63E-06

Pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun perlu kebijakan yang mampu mendukung mekanisme transmisi terhadap pemberdayaan penduduk miskin. Dalam perspektif provinsi Jawa Tengah, lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di tahun 2020 mendorong semakin bertambahnya penduduk di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini juga dialami oleh semua daerah di Jawa Tengah, seperti Kota Magelang yang juga bertambah 2000 orang dan Kota Semarang yang bahkan bertambah sebesar 7.600 orang penduduk miskin. Di tingkat provinsi jumlah penduduk miskin selama 2019-2020 bertambah sebesar 237.670 orang atau naik 6,35%. Rata-rata jumlah penduduk penduduk miskin di seluruh daerah di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 6.790 orang atau 6,35% sementara secara nasional jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 1.638.020 atau naik 6,61%.

**Tabel 4.19**

**Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Surakarta vs Provinsi vs Nasional  
Tahun 2019-2020 (ribuan orang)**

<b>Wilayah</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>(Naik/Turun)</b>	<b>(%)</b>
Kota Magelang	9,1	9,3	0,20	2,20
<b>Kota Surakarta</b>	<b>45,2</b>	<b>47</b>	<b>1,80</b>	<b>3,98</b>
Kota Salatiga	9,2	9,7	0,50	5,43
Kota Semarang	72	79,6	7,60	10,56
Kota Pekalongan	20,2	22,2	2,00	9,90
Kota Tegal	18,6	19,5	0,90	4,84
Provinsi Jawa Tengah	3743,23	3980,9	237,67	6,35
Indonesia	24.786,00	26.424,02	1.638,02	6,61
Rata-rata Jawa Tengah	106,95	113,74	6,79	6,35
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	29,05	31,22	2,17	7,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Peningkatan jumlah penduduk miskin berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran yaitu rasio jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun. Tingkat kemiskinan di Kota Surakarta tahun 2019 adalah 8,70% dan tahun 2020 naik menjadi 9,03%. Dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, angka ini tergolong cukup tinggi, meski masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional. Meskipun demikian kenaikan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta selama 2019-2020 yang besarnya 0,33%

tergolong kecil bila dibandingkan dengan rata-rata daerah di Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, maupun nasional.

**Tabel 4.20**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional**  
**Tahun 2019-2020**

Wilayah	2019	2020	(Naik/Turun)
Kota Magelang	7,46	7,58	0,12
<b>Kota Surakarta</b>	<b>8,70</b>	<b>9,03</b>	<b>0,33</b>
Kota Salatiga	4,76	4,94	0,18
Kota Semarang	3,98	4,34	0,36
Kota Pekalongan	6,60	7,17	0,57
Kota Tegal	7,47	7,80	0,33
Provinsi Jawa Tengah	10,80	11,41	0,61
Indonesia	9,22	9,78	0,56
Rata-rata Jawa Tengah	9,89	10,46	0,58
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	6,27	6,59	0,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Untuk indikator P1 dan P2, bila dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, kondisi Surakarta untuk P1 dan P2 masih yang tertinggi selama 2019-2020 bahkan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius mengingat P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Dengan nilai P1 sebesar itu, berarti pengeluaran penduduk miskin di Surakarta adalah yang terjauh dari garis kemiskinan dibandingkan kota lain. Untuk P2, pengeluaran diantara penduduk miskin di Surakarta adalah yang paling timpang dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah.

**Tabel 4.21**  
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019-2020**

Wilayah	2019	2020	(Naik/Turun)
Kota Magelang	0,99	1,12	0,13
<b>Kota Surakarta</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,10</b>
Kota Salatiga	0,83	0,53	-0,30
Kota Semarang	0,57	0,68	0,11
Kota Pekalongan	0,92	1,28	0,36
Kota Tegal	1,15	1,38	0,23
Provinsi Jawa Tengah	1,53	1,72	0,19
Indonesia	1,55	1,75	0,20
Rata-rata Jawa Tengah	1,23	1,39	0,16
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,96	1,01	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Tabel 4.22****Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2020**

Wilayah	2019	2020	(Naik/Turun)
Kota Magelang	0,19	0,23	0,04
<b>Kota Surakarta</b>	<b>0,48</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,10</b>
Kota Salatiga	0,2	0,08	-0,12
Kota Semarang	0,12	0,16	0,04
Kota Pekalongan	0,18	0,3	0,12
Kota Tegal	0,24	0,36	0,12
Provinsi Jawa Tengah	0,30	0,34	0,04
Indonesia	0,37	0,47	0,10
Rata-rata Jawa Tengah	0,23	0,26	0,03
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,21	0,22	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah

Besar kecilnya tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk, sementara penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2019 garis kemiskinan Kota Surakarta adalah Rp473.516 dan tahun 2020 naik menjadi Rp487.445 atau naik sebesar 2,94%. Kenaikan yang terjadi di tahun 2020 tersebut secara relatif adalah yang terkecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, provinsi, maupun nasional

**Tabel 4.23****Perbandingan Garis Kemiskinan Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2019-2020**

Wilayah	2019	2020	(Naik/Turun)	(%)
Kota Magelang	481.282	522.099	40.817	8,48
<b>Kota Surakarta</b>	<b>473.516</b>	<b>487.445</b>	<b>13.929</b>	<b>2,94</b>
Kota Salatiga	418.955	454.154	35.199	8,40
Kota Semarang	474.930	522.691	47.761	10,06
Kota Pekalongan	425.026	460.789	35.763	8,41
Kota Tegal	465.047	502.031	36.984	7,95
Provinsi Jawa Tengah	369.385	395.407	26.022	7,04
Indonesia	440.538	454.652	14.114	3,20
Rata-rata Jawa Tengah	378.302	400.123	21.820	5,77
Rata-rata Kota di Jawa Tengah	456.459	491.535	35.076	7,68

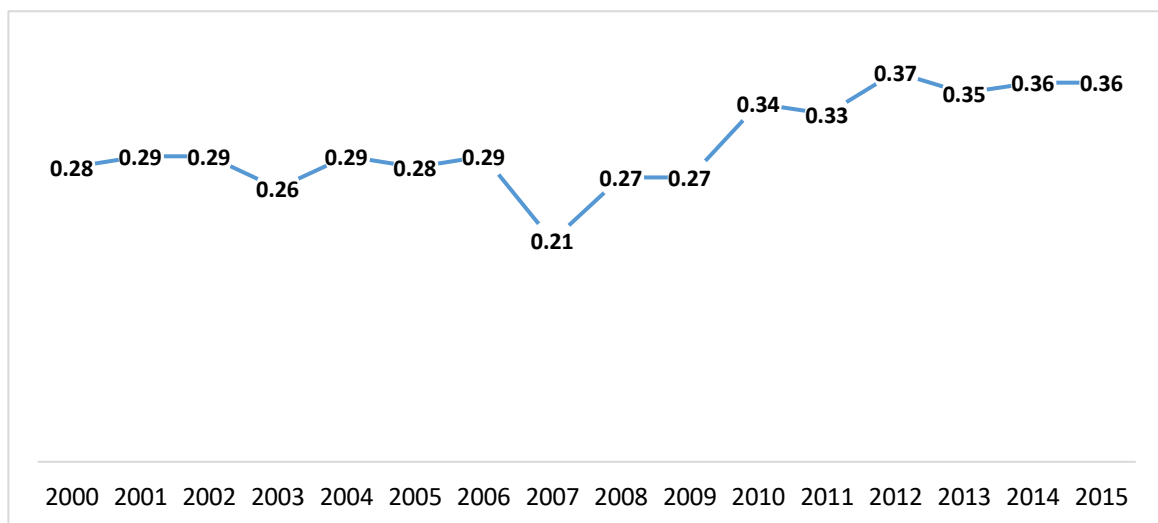
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah



## 4.5. ANALISIS KETIMPANGAN

### 4.5.1. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Surakarta, dapat dilihat berdasarkan Gini Ratio atau indeks gini. Nilai Indeks Gini Surakarta tahun 2015 adalah 0,360 dan kondisi tersebut tidak berbeda dibandingkan tahun 2014. Angka indeks gini yang di atas 0,30 merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Secara grafis terlihat bahwa tingkat ketimpangan di Surakarta menunjukkan tren yang meningkat sepanjang 2000-2015. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi Surakarta belum memberikan dampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016.

**Gambar 4.4**

### Indes Gini Kota Surakarta Tahun 2000-2015

Data indeks gini di daerah hingga saat ini hanya terdapat sampai tahun 2015 dan BPS hanya melakukan perhitungan indeks gini pada level provinsi dan nasional. Hal ini membuat Surakarta mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi. Bila dilakukan prediksi Indeks Gini menggunakan beberapa pendekatan, maka nilai indeks Gini Kota Surakarta pada tahun 2020 diperkirakan antara 0,357 s.d. 0,390. Prediksi indeks gini disebut dengan indeks ketimpangan baru dimana menggunakan metode rata-rata bergerak 2 dan 3 periode menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda.

Prediksi	2020
Least Square	0,38
Moving Average-3 periode	0,36
Moving Average-2 periode	0,36

Selain menggunakan Indeks Gini, ketimpangan distribusi pendapatan dapat pula diukur menggunakan metode lain seperti yang dinyatakan oleh Sitthiyot dan Holasut (2020)<sup>5</sup> yang dimodifikasi menggunakan data distribusi pendapatan Bank Dunia. Metode yang dilakukan Sitthiyot dan Holasut (2020) menggunakan formula sebagai berikut:

$$I_i = \frac{\sqrt{\text{Gini}_i^2 + \left[ \left( 1 - \left( \frac{B_{10}}{T_{10}} \right)_i \right)^{\frac{1}{4}} \right]^2}}{\sqrt{2}}, 0 \leq I_i \leq 1$$

$I_i$  merupakan Indeks Ketimpangan Baru, Gini merupakan nilai Indeks Gini B10 dan T10 merupakan rasio penduduk berpenghasilan 10% bawah (10% bottom) dan 10% atas (10% top). Proxy Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rata-rata selisih antara Indeks Gini 2001-2015 dengan hasil perhitungan Indeks ketimpangan Baru. Berdasarkan pendekatan tersebut, diperoleh informasi indeks sebagai berikut:

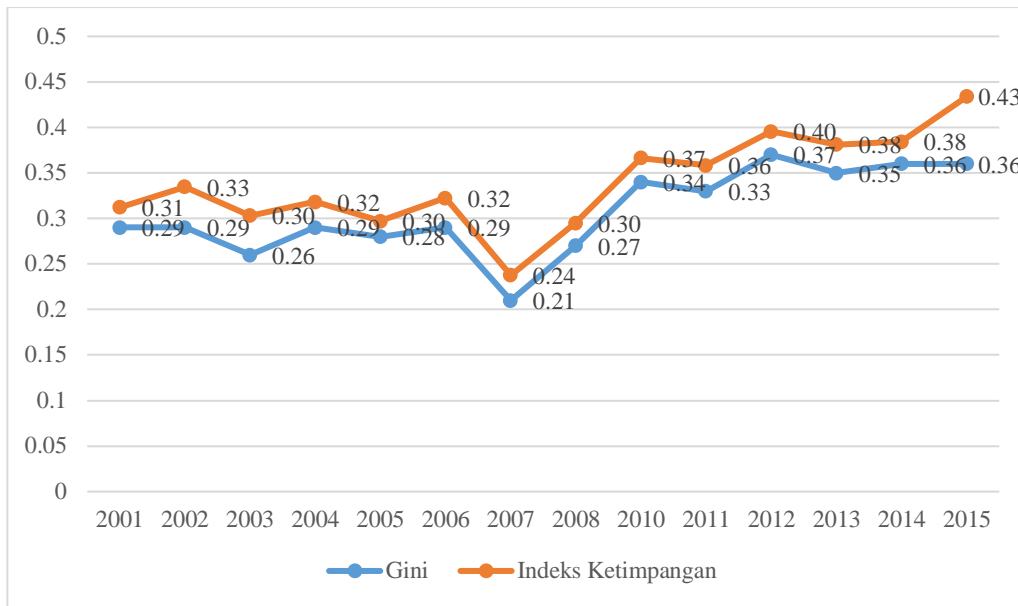
**Tabel 4.24**  
**Prediksi Indeks Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

Tahun	Gini	Indeks Ketimpangan Baru	Selisih
2001	0,29	0,31	0,02
2002	0,29	0,33	0,04
2003	0,26	0,30	0,04
2004	0,29	0,32	0,03
2005	0,28	0,30	0,02
2006	0,29	0,32	0,03
2007	0,21	0,24	0,03
2008	0,27	0,30	0,03
2010	0,34	0,37	0,03
2011	0,33	0,36	0,03
2012	0,37	0,40	0,03
2013	0,35	0,38	0,03
2014	0,36	0,38	0,02
2015	0,36	0,43	0,07
2016*	<b>0,35</b>	0,38	
2017*	<b>0,36</b>	0,39	
2018*	<b>0,36</b>	0,39	
2019*	<b>0,35</b>	0,38	
2020**	<b>0,36</b>	0,39**	

\*Hasil proxy menggunakan rata-rata deviasi

Sumber: Data diolah, 2021

<sup>5</sup> Sitthiyot, Thititthep dan Kanyarat Holasut (2020) "A Simple Method for measuring inequality". *Palgrave Communications*



Sumber: Data diolah, 2021

**Gambar 4.5**

**Hasil Perbandingan Indeks Gini vs Indeks Ketimpangan Baru Kota Surakarta Tahun 2000-2015**

Nilai Indeks Gini Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Tahun 2015 misalnya, nilai Indeks Gini Jawa Tengah sebesar 0,382 dan nasional sebesar 0,402. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Surakarta. Tahun 2019, indeks Gini Jawa Tengah sebesar 0,361, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang besarnya 0,357.

**Tabel 4.25**

**Indeks Gini Kota Surakarta vs Provinsi vs Nasional Tahun 2010-2020**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surakarta	0,340	0,330	0,370	0,350	0,360	0,360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	Provinsi Jawa Tengah	0,341	0,357	0,383	0,390	0,388	0,382	0,357	0,365	0,357	0,361	0,359
3	Indonesia	0,378	0,388	0,413	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382	0,385
4	Rata-rata Jawa Tengah	0,264	0,325	0,338	0,332	0,331	0,331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	0,304	0,331	0,350	0,340	0,338	0,338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Badan Pusat Statistis Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

#### 4.5.2. Indeks Williamson

Ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kota Surakarta yang diukur menggunakan Indeks Williamson didasarkan pada data jumlah penduduk dan PDRB perkapita masing-masing kecamatan sebagaimana yang telah dihitung dan diukur sebelumnya. Hasil perhitungan nilai Indeks Williamson disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan, ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta yang diukur menggunakan Indeks Williamson adalah sebesar 0,335 di tahun 2019 dan 0,359 di tahun 2020 atau dengan kata lain terjadi kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan pada periode 2019-2020.

**Tabel 4.26**

**Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Laweyan	0,064	0,066	0,061	0,060	0,060	0,059	0,051	0,054	0,022	0,022	0,002
Serengan	0,034	0,039	0,048	0,051	0,051	0,050	0,071	0,070	0,041	0,043	0,047
Pasar Kliwon	0,130	0,130	0,118	0,120	0,116	0,116	0,116	0,122	0,105	0,105	0,098
Jebres	0,113	0,116	0,125	0,124	0,127	0,128	0,140	0,141	0,144	0,147	0,167
Banjarsari	0,036	0,037	0,032	0,042	0,034	0,032	0,074	0,077	0,036	0,039	0,046
<b>Indeks Williamson Kota Surakarta</b>	<b>0,377</b>	<b>0,388</b>	<b>0,384</b>	<b>0,397</b>	<b>0,388</b>	<b>0,385</b>	<b>0,453</b>	<b>0,464</b>	<b>0,348</b>	<b>0,355</b>	<b>0,359</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Kesimpulan dari skor Indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan antar kecamatan yang artinya terjadi ketidakmerataan pendapatan di Kota Surakarta. Ketimpangan antar kecamatan disebabkan adanya kantong-kantong kemiskinan, lingkungan sekitar, dan budaya masyarakat. Salah satu contoh di Kecamatan Laweyan memiliki skor Indeks Williamson terkecil yang artinya memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang kecil. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk laweyan yang produksi bekerja juga berwirausaha sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan yang dikenal dengan Kampung Batik Laweyan, dimana banyak wirausaha yang bergerak dibidang produksi batik.

Kecamatan Jebres memiliki skor Indeks Williamson yang tertinggi, yang artinya memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Jebres tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Diperlukan upaya OPD terkait untuk meningkatkan iklim investasi di Kecamatan Jebres sehingga akan terbuka banyak lapangan usaha baru. Dalam permasalahan ini diperlukan peran aktif seluruh OPD terkait antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) serta masyarakat dalam rangka menurunkan angka ketimpangan yang artinya pemerataan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson 2010-2020, maka dilakukan proyeksi ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan beberapa pendekatan yaitu rata-rata pertumbuhan, least square, serta moving average. Untuk memilih metode yang paling sesuai, dipergunakan kriteria *sum square of error* (SSE), *mean square error* (MSE), serta *root mean square error* (RMSE). Hasil proyeksi 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan maka hasil proyeksi yang terbaik adalah proyeksi dengan *least square*. Hal ini dikarenakan memiliki nilai SSE, MSE dan RMSE dengan rata-rata terkecil, yang artinya memiliki keakuratan yang paling tinggi.

**Tabel 4.27**  
**Proyeksi Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2020**

PROYEKSI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SSE	MSE	RMSE
Least Square	<b>0,356</b>	0,382	0,380	0,378	0,375	0,373	0,371	0,016	0,001	0,000
Growth Rate		0,354	0,351	0,348	0,346	0,343	0,340	0,021	0,002	0,000
MA (2)		0,357	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,021	0,002	0,049
MA (3)		0,354	0,356	0,356	0,355	0,356	0,356	0,020	0,002	0,050
MA (4)		0,381	0,361	0,364	0,366	0,368	0,365	0,019	0,003	0,051
Indeks Ketimpangan Baru vs Indeks Gini	Menggunakan data Indeks Gini 2001-2015							0,017	0,001	0,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

#### 4.5.3. Indeks Theil

Berbeda dengan Indeks Williamson, Indeks Theil dipergunakan untuk melihat ketimpangan masalah kemiskinan. Dalam Indeks Theil, diperlukan data atau informasi tentang jumlah penduduk miskin di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil sedangkan Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, namun dari aspek tingkat kemiskinan (yaitu rasio antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah seluruh penduduk), tingkat kemiskinan di Kecamatan Serengan adalah yang terbesar di tahun 2020 yaitu 10,82% sementara Kecamatan Jebres memiliki tingkat kemiskinan terkecil yaitu 7,33% di tahun yang sama. Kecamatan Jebres merupakan kecamatan yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

**Tabel 4.28****Indikator Kemiskinan Antar Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2018-2020**

Kecamatan	Penduduk Miskin (Orang)			Jumlah Penduduk (Orang)			Tingkat Kemiskinan (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Laweyan	12.697	7.457	6.996	101.873	102.524	88.524	12,46	7,27	7,90
Serengan	8.114	4.916	5.171	54.323	54.671	47.778	14,94	8,99	10,82
Pasar Kliwon	15.581	6.350	6.739	86.350	86.890	78.517	18,04	7,31	8,58
Jebres	23.460	11.710	10.179	146.051	147.694	138.775	16,06	7,93	7,33
Banjarsari	29.993	14.747	17.945	181.114	183.451	168.770	16,56	8,04	10,63
Jumlah	89.845	45.180	47.030	569.711	575.230	522.364	15,77	7,85	9,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Theil 2020 Kota Surakarta adalah 3,523 dan nilai indeks ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang besarnya 3,499. Dengan demikian, selama 2019-2020 terjadi kenaikan konsentrasi kemiskinan di Kota Surakarta khususnya di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon.

**Tabel 4.29****Indeks Theil Kota Surakarta Tahun 2018-2020**

Kecamatan	2018	2019	2020
Laweyan	0,422	0,549	0,478
Serengan	0,305	0,412	0,428
Pasar Kliwon	0,657	0,469	0,486
Jebres	0,923	0,911	0,660
Banjarsari	1,202	1,157	1,471
Jumlah	3,509	3,499	3,523

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2021.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Kinerja makroekonomi Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator makroekonomi seperti garis kemiskinan, IPM, dan IPG Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Proxy PDRB atau ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kota Surakarta berdasarkan PDRB harga berlaku menunjukkan rata-rata nilai Indeks Williamson terkecil adalah Kecamatan Laweyan yang artinya tingkat ketimpangan penduduk kecamatan terendah. Sedangkan Indeks Williamson terbesar adalah Kecamatan Jebres yang artinya tingkat ketimpangan penduduk kecamatan tertinggi.
3. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks gini maupun pengukuran menggunakan Indeks Williamson. Sedangkan dari hasil proyeksi angka Indeks Williamson, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Surakarta Tahun 2021-2026 akan mengalami penurunan.

#### **5.2. REKOMENDASI**

1. Ketimpangan merupakan efek samping dari kemiskinan dan pengangguran, sehingga kebijakan dan strategi perlu difokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.
  - a. Perlu disusun *database* kemiskinan yang komprehensif dan standar di setiap kecamatan bekerjasama dengan bps dan kantor kecamatan.

Program ini dilakukan dengan melibatkan kecamatan yang berperan dalam proses pengelolaan data kemiskinan. OPD terkait menyusun system informasi kemiskinan yang diintegrasikan dengan data kependudukan dengan kecamatan sebagai pelaksana utama sehingga memudahkan penyusunan strategi serta diperolehnya gambaran riil faktor-faktor penyebab kemiskinan yang (mungkin) berbeda di setiap kecamatan.
  - b. OPD terkait perlu menyusun PDRB kecamatan untuk memudahkan *mapping*/pemetaan perekonomian di level kecamatan, serta memudahkan penghitungan berbagai indikator di tingkat kecamatan yang dibutuhkan.

PDRB kecamatan merupakan informasi yang sangat penting kaitannya dengan kebijakan dan strategi yang berbasis spasial dan sektoral. Penyusunan PDRB kecamatan melibatkan BPS. Berdasarkan data PDRB Kota Surakarta Tahun 2020, sektor yang cenderung mengalami pertumbuhan PDRB di tahun 2020 antara lain sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor informasi dan komunikasi; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 sehingga meningkatkan penggunaan pada sektor-sektor tersebut. Sedangkan sektor lain hampir semuanya mengalami penurunan, yang paling parah adalah sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melakukan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga mobilitas menjadi sangat berkurang yang berdampak pada sektor-sektor tersebut.

- c. Perlu upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi dana APBD serta kerjasama dengan OJK/perbankan untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal atau ekonomi kreatif.

Anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk pengembangan ekonomi masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk menghindari adanya kemiripan atau kesamaan program dan sasaran. Dengan demikian implementasi program yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih sistematis dan fokus dengan sasaran yang lebih terarah. OJK atau perbankan bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap perbankan untuk menciptakan iklim keuangan yang sehat.

- d. Memberdayakan dan memperkuat balai latihan kerja dengan OPD dan pihak terkait atau perusahaan melalui skema CSR.

BLK diprioritaskan sebagai pusat pelatihan ekonomi masyarakat, yang datanya bersumber dari Kecamatan atau OPD terkait dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin). Materi pelatihan merupakan materi yang sederhana dan aplikatif serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya penting untuk melibatkan pelaku usaha besar melalui skema CSR sehingga pelaku usaha besar perlu dilibatkan dalam kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat.

- e. Memperkuat forward and backward linkages antara UMKM dengan perusahaan besar untuk memperluas multiplier effect.

Perusahaan besar menyusun berbagai kebutuhan sumber daya yang dapat dipenuhi oleh UMKM Kota Surakarta melalui skema “UMKM Binaan” atau skema “Bapak Angkat”.



Dalam hal ini dibutuhkan peran OPD terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Surakarta. Perusahaan dapat diikat dengan Perda atau Perwali yang berisi pemenuhan berapa % sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari UMKM yang ada di Kota Surakarta, sehingga akan memberikan multiplier effect yang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

- f. Dalam jangka pendek memprioritaskan pengembangan sektor ekonomi yang berdampak langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja (sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja).

Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sekitar 29 persen. Dari sisi jenis kelaminnya, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan dari sisi pendidikannya, Sebagian besar adalah penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA. Dengan demikian pengembangan ekonomi diarahkan pada perdagangan yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

2. Proyeksi ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan beberapa pendekatan yaitu rata-rata pertumbuhan, least square, serta moving average. Untuk memilih metode yang paling sesuai, dipergunakan kriteria sum square of error (SSE), mean square error (MSE), serta root mean square error (RMSE). Berdasarkan hasil perhitungan maka hasil proyeksi yang terbaik adalah proyeksi dengan least square karena memiliki nilai kriteria sum square of error (SSE), mean square error (MSE) dan serta root mean square error (RMSE) dengan rata-rata terkecil, yang artinya memiliki keakuratan yang paling tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2021. <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. <https://jateng.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2021. <https://kemnaker.go.id>. Diakses 19 April 2021.
- Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World development*, 32(8), 1419-1439.